



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Instansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Palembang, 12 Maret 2026

INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



Dr. H. KURNIAWAN, AP., M.Si. CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

KATA PENGANTAR

Dengan berakhirnya masa pelaksanaan program/ kegiatan Tahun Anggaran 2025 berarti Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan implementasi dari salah satu bagian dari Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025. Implementasi Rencana Strategis 2025-2029 dan RKT 2025 telah memberikan arah dan fokus bagi peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKjIP sebagai bagian integral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh. Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja adalah media bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan (Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja adalah sumber informasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sendiri, sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKjIP 2025 harus dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna eksternal dan internal.

Laporan akuntabilitas kinerja ini pada dasarnya berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2025. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025 pada dasarnya adalah sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan capaian kinerja (*Performance Results*) adalah hasil realisasi dari rencana kinerja tersebut.

Berkaitan dengan fungsi LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada para stakeholders maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya.

Berkaitan dengan fungsi LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada para stakeholders maka informasi kinerja yang diungkapkan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasan-penjelasanannya.

Selanjutnya guna memenuhi fungsi LKjIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam LKjIP juga meliputi analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa-masa berikutnya.

Akhir kata, kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palembang, 15 Februari 2026


Kepala Dinas
Dj. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19670315 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Aspek Strategis Organisasi	5
C. Tugas Pokok dan Fungsi	6
D. Struktur Organisasi.....	8
E. Sumber Daya Manusia.....	10
F. Dukungan Anggaran	11
G. Permasalahan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan	11
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
I. Definisi Operasional Indikator Kinerja	20
II. Analisis Atas Capaian Kinerja Tahun 2025.....	21
a. Nilai Tukar Petani	22
1) Sub Sektor Tanaman Pangan	22
2) Sub Sektor Hortikultura	23
b. Tanaman Pangan	24
1) Komoditi Padi.....	24
2) Komoditi Jagung	28
c. Tanaman Hortikultura	31
1) Komoditi Cabai Besar	32
III. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	35
IV. Analisis Alternatif Solusi	37
V. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
VI. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	40
B. Realisasi Anggaran.....	42
BAB IV PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Langkah Strategis	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan Sasaran, Indikator, Indikator Tujuan OPD, Indikator Sasaran OPD.....	17
Tabel 2. Tujuan, Sasaran Rencana Strategis beserta Indikator Kinerja.....	17
Tabel 3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	18
Tabel 4. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan	21
Tabel 5. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran	39
Tabel 6. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
Tabel 7. Analisis Program/Kinerja yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Manajemen Sektor Publik (Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP) ..	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 41 Tahun 2016).....	8
Gambar 3.	Alur Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	10
Gambar 4.	Grafik Capaian NTP Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2025 terhadap Target NTP Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2025 berdasarkan Target Renstra.....	22
Gambar 5.	Grafik Capaian NTP Sub Sektor Hortikultura Tahun 2025 terhadap Target NTP Sub Sektor Hortikultura Tahun 2025 berdasarkan Target Renstra	23
Gambar 6.	Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Target Produksi Padi Tahun 2025 berdasarkan Target Renstra.....	24
Gambar 7.	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Padi Tahun 2025.....	25
Gambar 8.	Grafik Capaian Produksi Padi Thn 2025 terhadap Capaian Produksi Padi Tahun 2024	26
Gambar 9.	Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Target Produksi Padi Tahun 2026 berdasarkan Renstra 2025-2029	26
Gambar 10.	Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Target Produksi Padi Jangka Panjang Renstra 2025-2029	27
Gambar 11.	Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Target Nasional.....	28
Gambar 12.	Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Target Produksi Jagung Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029.....	28
Gambar 13.	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Jagung Tahun 2025.....	29
Gambar 14.	Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Capaian Produksi Jagung Tahun 2024.....	29
Gambar 15.	Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Target Produksi Jagung Tahun 2026 berdasarkan Renstra 2025-2029.....	30
Gambar 16.	Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Target Produksi Jagung Jangka Menengah Renstra 2025-2029.....	30
Gambar 17.	Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Target Nasional	31
Gambar 18.	Grafik Capaian Produksi Komoditi Cabai Besar pada Tahun 2025 terhadap target Produksi Tahun 2025.....	32
Gambar 19.	Grafik Capaian Produksi dan Produktivitas Komoditi Cabai Besar pada Tahun 2025 dan Tahun 2024.....	33
Gambar 20.	Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura (Cabai Besar) Tahun 2025.....	33
Gambar 21.	Grafik Capaian Produksi Komoditi Cabai Besar pada Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2026.....	34
Gambar 22.	Grafik Capaian Produksi Cabai Besar Tahun 2025 terhadap Target Produksi Cabai Besar Renstra 2025-2029.....	34
Gambar 23.	Grafik Capaian Produksi Cabai Besar Tahun 2025 terhadap Target Nasional	35
Gambar 24.	Total Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025.....	43
Gambar 25.	Total Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 ...	43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENGUKURAN TAHUN 2025
- Lampiran 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
- Lampiran 3. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025
- Lampiran 4. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) APBD TAHUN 2025
- Lampiran 5. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) APBN TAHUN 2025
- Lampiran 6. HASIL REVIU INTERNAL LKJIP DINAS PERTANIAN TPH TAHUN 2025
- Lampiran 7. KOREKSI LAPORAN KINERJA
- Lampiran 8. HASIL REVIU LKJIP DINAS PERTANIAN TPH TAHUN 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan melaporkan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2025, selama periode ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun anggaran 2025 telah menyusun sebanyak 11 program (5 Program APBD, 6 Program APBN), 12 kegiatan APBD dan 12 Kegiatan APBN (4 kegiatan Dekonsentrasi, 8 kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi).

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mendapat dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp 1.863.212.688.730**. Dana tersebut telah terealisasi sebesar **Rp 1.495.328.848.007** atau **80,26%**. Alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD tahun 2025 sebesar **Rp 118.329.350.730**. Realisasi Keuangan untuk dana APBD mencapai dari alokasi dana yang bersumber dari APBD, telah terealisasi sebesar **Rp 113.121.126.040** atau **95,60%**. Alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar **Rp 1.744.883.338.000** terdiri dari Dana Dekonsentrasi sebesar **Rp 687.065.000**, dan Dana Tugas Pembantuan Provinsi sebesar **Rp 1.744.196.273.000**. Realisasi keuangan untuk Dana APBN mencapai **Rp 1.382.207.721.967** atau **79,21%**, yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi mencapai **Rp 574.559.000** atau **83,63%**. Realisasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi mencapai **Rp 1.381.663.162.967** atau **79,21%**.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis. Hal ini dikarenakan telah dilakukan revisi terhadap target yang ditetapkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum mencapai target kinerja. Namun, ada beberapa target kinerja khususnya komoditi padi dan komoditi cabai besar yang melampaui target kinerja. Hal ini akan menjadi catatan bagi perencanaan untuk menetapkan target sasaran pada dokumen RPJMD berikutnya.

Jika dilihat dari realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan program/ kegiatan rata-rata sudah mencapai realisasi di atas 80% baik yang bersumber dana dari APBD maupun APBN. Ke depannya, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera

Selatan tetap akan fokus pada percepatan pelaksanaan program/ kegiatan guna meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan pembangunan pertanian di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang serta memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berdaya saing, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Sumatera Selatan memasuki periode pertama pencapaian visi pembangunan jangka panjang yakni perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki nilai strategis yang sangat tinggi karena merupakan periode pertama dimana tuntutan untuk mencapai target RPJPD juga memasuki periode pertama. Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”.

Visi tersebut diharapkan Provinsi Sumatera Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara, Sumsel menjadi Provinsi berdaya saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumsel sebagai Provinsi yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- (2) Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan keberlanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
- (3) Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;

- (4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
- (5) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;
- (6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas;
- (7) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan tujuan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, peningkatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang merata, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Tujuan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran pembangunan daerah yang terukur, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan.

Arah kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 untuk tahap pertama pembangunan jangka menengah daerah difokuskan untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Adapun arah kebijakan pada tahapan kesatu ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dalam bidang pendidikan, keterampilan dan kesehatan,
- 2) Peningkatan perlindungan sosial adaptif melalui perluasan perlindungan yang menyeluruh sesuai dengan kerentanan yang berprinsip adil dan inklusif,
- 3) Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kompetensi (*upskilling/reskilling*),
- 4) Peningkatan infrastruktur terutama di bidang jalan, transportasi, energi, dan komunikasi dalam rangka mendukung pusat pertumbuhan,
- 5) Peningkatan iklim investasi di seluruh sektor perekonomian pada lingkup Industri Kecil dan Menengah, UMKM, Koperasi, BUMD, BUMDes,
- 6) Pengembangan IPTEK, inovasi dan digitalisasi di seluruh sektor Pembangunan,
- 7) Identifikasi potensi *green economy*, *blue economy*, dan *circular economy* di seluruh wilayah,
- 8) Pengembangan daya tarik daerah, terutama dalam bidang pariwisata dan budaya,

- 9) Identifikasi produk unggulan yang berkelanjutan dalam menuju hilirisasi produk,
- 10) Pengembangan teknologi di bidang energi dalam mendukung transisi energi yang berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan.,
- 11) Peningkatan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah; peningkatan kapasitas fiskal yang bersumber dari pendanaan inovatif; peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan; serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi,
- 12) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, kebebasan sipil dan kesetaraan, kapasitas fungsi dan integritas lembaga demokrasi,
- 13) Peningkatan ketahanan keluarga dan pengarusutamaan gender,
- 14) Penguatan Toleransi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghargai keberagaman, serta penguatan kebudayaan dalam melestarikan warisan budaya lokal dan nasional,
- 15) Peningkatan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem lingkungan, hutan, dan lahan gambut,
- 16) Penyelarasan rencana pembangunan dan tata ruang yang memperhatikan daya dukung lingkungan hidup,
- 17) Pengembangan teknologi di bidang pangan dan air untuk meningkatkan produktivitas Sumber Daya Alam,
- 18) Peningkatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan permukiman, bidang pendidikan dan kesehatan di semua wilayah terutama di daerah terpencil dan tertinggal

Sebagai bagian dari perangkat daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pertanian. Peran ini diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan tanaman pangan dan hortikultura guna mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Tujuan perangkat daerah di bidang pertanian diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Adapun sasaran perangkat daerah meliputi:

- Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
- Meningkatnya ketersediaan dan kemandirian benih;

- Meningkatnya pemanfaatan lahan pertanian secara optimal;
- Meningkatnya kualitas dan daya saing hasil pertanian;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pertanian;
- Meningkatnya kesejahteraan petani.

Dengan demikian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari *good governance*. Dengan dikembangkan dan diterapkannya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada seluruh kabupaten/ kota, akuntabilitas kinerja bidang pertanian sub sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat ditingkatkan. Pencapaian kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para stakeholders (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggung jawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintahan yang akuntabel. Selanjutnya informasi kinerja yang ada dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah untuk perbaikan kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan aspek penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*. SAKIP merupakan salah satu dari area perubahan reformasi birokrasi dalam upaya untuk penguatan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana sistem ini merupakan integrasi perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Salah satu bagian dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana terlihat pada Gambar 1. LKjIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/ APBD. Penyusunan LKjIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 (satu) tahun. Dalam pembuatan LKjIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LKjIP bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap instansi

pemerintah yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun anggaran.



AKUNTABILITAS KEUANGAN

AKUNTABILITAS KINERJA



Gambar 1. Alur Manajemen Sektor Publik (Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP)

B. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi merupakan faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Identifikasi terhadap aspek strategis ini sangat penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan organisasi.

Dalam konteks pembangunan daerah, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan pertanian masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan.

Adapun aspek strategis yang memengaruhi kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pertanian

Masih terdapat lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal serta adanya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan.

2. **Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian**

Kebutuhan pangan yang terus meningkat menuntut adanya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.

3. **Ketahanan Pangan Daerah**

Stabilitas ketersediaan pangan menjadi isu strategis yang harus dijaga melalui peningkatan indeks pertanaman, penguatan sistem produksi, serta pengelolaan sumber daya pertanian yang berkelanjutan.

4. **Perubahan Iklim dan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**

Perubahan iklim dan meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman menjadi tantangan serius yang dapat menurunkan produktivitas pertanian.

5. **Kemandirian Benih dan Sarana Produksi Pertanian**

Ketersediaan benih bermutu dan sarana produksi yang memadai masih menjadi kendala dalam mendukung peningkatan hasil pertanian.

6. **Sistem Pemasaran dan Nilai Tambah Produk**

Fluktuasi harga dan lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pemasaran menjadi tantangan dalam meningkatkan pendapatan petani.

7. **Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian**

Kualitas sumber daya manusia, baik petani maupun penyuluh, masih perlu ditingkatkan dalam hal penguasaan teknologi dan inovasi pertanian.

8. **Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja**

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan berbagai aspek strategis tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan yang adaptif, inovatif, dan tepat sasaran. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. **Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dengan dilengkapi peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.41 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

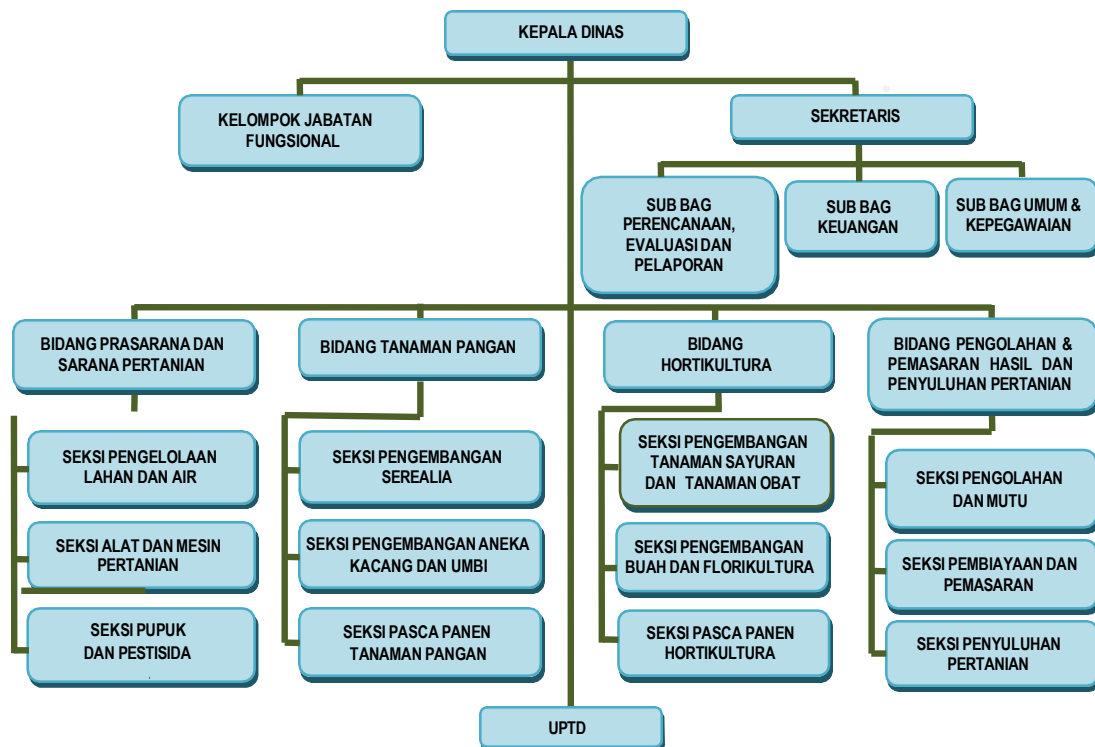
Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Kedudukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan hortikultura. Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Adapun fungsi Dinas adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
3. Pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian;
4. Pelaksanaan penataan prasarana pertanian;
5. Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
6. Pelaksanaan pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/ daerah;
7. Pelaksanaan pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
9. Pelaksanaan pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
10. Pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
11. Pelaksanaan pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
12. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
13. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas Pertanian dibantu oleh 9 (sembilan) unit eselon III yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) Bidang yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan masing-masing dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala seksi dan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dipimpin oleh Kepala UPTD. Bagan Struktur Organisasi Dinas secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 41 Tahun 2016)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Provinsi Sumatera Selatan. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana

Strategis yang mendefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/ sasaran strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/ kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dinas sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LKjIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut ini :

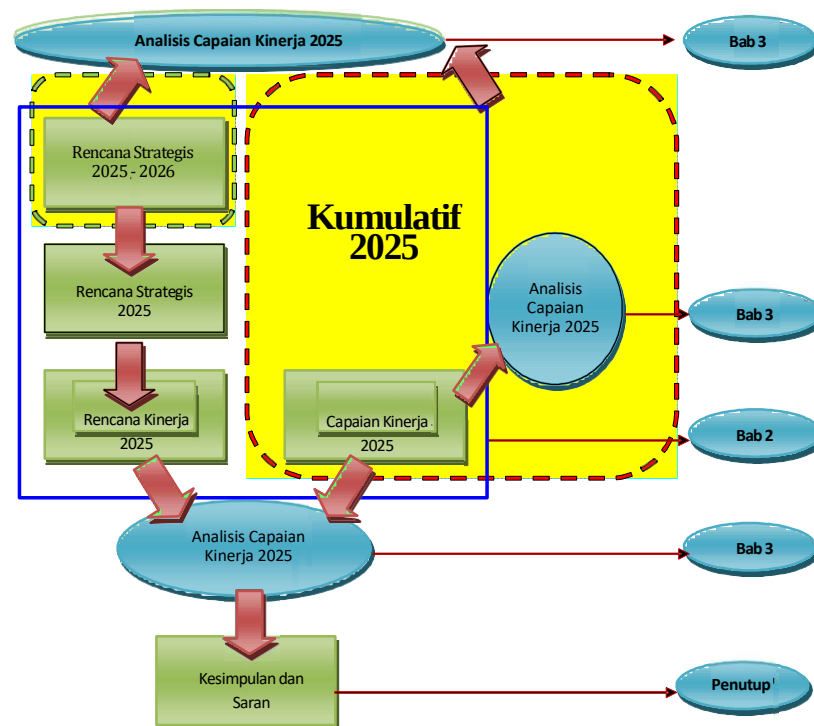
1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menginformasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2025 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance results*) tahun

2025, yaitu:

1. **Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2025** digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.
2. **Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025**, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang diuraikan dalam Rencana Strategis 2025-2029.

Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk menilai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis akhir tahun 2025.



Gambar 3. Alur Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

E. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai negeri sipil dilingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 berjumlah 320 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan 85 orang PNS dan 64 orang PPPK
- UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 36 orang PNS dan 20 orang PPPK
- UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 54 orang PNS dan 7 orang PPPK
- UPTD Balai Pelatihan Penyuluhan Pertanian 19 orang PNS dan 10 orang PPPK

- UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 12 orang PNS dan 13 orang PPPK

F. Dukungan Anggaran

Dalam melaksanakan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan beserta UPTD pada tahun 2025 mendapat dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp 1.863.212.688.730,-** (Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

- Dana APBN sebesar **Rp. 1.744.883.338.000,-** (Satu Triliun Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- Dana APBD sebesar **Rp. 118.329.350.730,-** (Seratus Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah)

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (5 Program APBD, 6 Program APBN), 12 kegiatan APBD dan 12 Kegiatan APBN (4 kegiatan Dekonsentrasi, 8 kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi).

G. Permasalahan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global, yang ditelaah melalui pendekatan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan Perangkat Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan dari pembangunan pertanian Provinsi Sumatera Selatan serta menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdapat beberapa permasalahan, diantaranya rendahnya indeks pertanaman tanaman padi, adanya kecenderungan konversi lahan pertanian ke non pertanian, lahan sawah belum dimanfaatkan secara optimal, pemenuhan kebutuhan sendiri benih tanaman pangan di Provinsi Sumatera Selatan masih rendah, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), kecenderungan pada cuaca dan iklim, fluktuasi harga dan tengkulak, ketimpangan akses petani kecil terhadap program. Dari permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan isu strategis :

1. Rendahnya indeks pertanaman padi merupakan permasalahan utama yang berdampak langsung terhadap kerentanan ketahanan pangan, khususnya dalam menjaga stabilitas

produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan lahan belum optimal sehingga produksi padi belum mampu memenuhi kebutuhan secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan dalam pengembangan hilirisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura turut memperlemah nilai tambah hasil produksi serta daya saing produk pertanian. Oleh karena itu, peningkatan indeks pertanaman, penguatan ketahanan pangan, optimalisasi hilirisasi, serta pengendalian OPT dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara simultan dan berkelanjutan.

2. Adanya kecenderungan konversi lahan pertanian ke nonpertanian merupakan isu strategis yang berpotensi mengancam keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Alih fungsi lahan yang terjadi secara bertahap maupun masif menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian produktif, sehingga berdampak pada penurunan kapasitas produksi pangan. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya yang belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Apabila tidak dikendalikan secara efektif, alih fungsi lahan pertanian dapat menurunkan kesejahteraan petani, mengganggu stabilitas produksi pangan. Oleh karena itu, pengendalian konversi lahan pertanian menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian dan penanganan terpadu.
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan produktivitas lahan sawah merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya intensitas tanam, keterbatasan infrastruktur irigasi, serta belum meratanya penerapan teknologi budidaya dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan akses petani terhadap sarana produksi dan permodalan turut menghambat optimalisasi lahan sawah. Apabila tidak ditangani secara serius, potensi lahan sawah yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan lahan sawah secara berkelanjutan menjadi isu strategis yang memerlukan penanganan terpadu melalui peningkatan indeks pertanaman, perbaikan infrastruktur, dan penguatan kapasitas petani.
4. Rendahnya pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan di Provinsi Sumatera Selatan merupakan isu strategis yang memengaruhi keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian benih belum sepenuhnya terwujud, sehingga masih terdapat ketergantungan terhadap pasokan benih dari luar daerah. Keterbatasan produksi benih bermutu, belum optimalnya peran

penangkar benih lokal, serta lemahnya sistem perbenihan dari hulu hingga hilir menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya ketersediaan benih. Apabila kondisi ini terus berlanjut, stabilitas produksi tanaman pangan berpotensi terganggu, terutama dalam menghadapi perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, penguatan kemandirian benih tanaman pangan melalui peningkatan produksi benih bermutu, pengembangan penangkar lokal, dan penguatan sistem perbenihan menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara terencana dan berkelanjutan.

5. Belum optimalnya mitigasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI) merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap penurunan produktivitas dan stabilitas produksi pertanian. Meningkatnya serangan OPT dan ketidakpastian iklim belum diimbangi dengan sistem pengendalian dan adaptasi yang efektif. Kondisi ini meningkatkan risiko gagal panen dan melemahkan ketahanan pangan, sehingga diperlukan upaya mitigasi OPT dan adaptasi perubahan iklim yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Fluktuasi harga hasil pertanian dan dominasi tengkulak merupakan isu strategis yang berdampak pada rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani. Ketidakstabilan harga, terutama pada saat panen raya, serta lemahnya posisi tawar petani dalam sistem pemasaran menyebabkan harga jual produk sering tidak menguntungkan petani. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya sistem tata niaga, akses pasar, dan mekanisme stabilisasi harga. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasaran, perlindungan harga, dan peningkatan posisi tawar petani menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara terintegrasi.
7. Ketimpangan akses petani kecil terhadap program dan layanan pembangunan pertanian merupakan isu strategis yang berdampak pada rendahnya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani. Keterbatasan informasi, persyaratan administrasi, serta lemahnya kelembagaan petani menyebabkan sebagian petani kecil belum dapat memanfaatkan program bantuan, pembiayaan, maupun pendampingan secara optimal. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan produktivitas dan pendapatan antarpetani. Oleh karena itu, peningkatan inklusivitas dan pemerataan akses program pertanian bagi petani kecil menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara berkelanjutan.

Dengan mencermati permasalahan dan isu strategis yang muncul, serta dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, maka arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

1. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan stabilitas produksi tanaman pangan dan hortikultura melalui optimalisasi indeks pertanaman padi. Strategi yang ditempuh meliputi penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pengembangan infrastruktur irigasi serta perluasan lahan sawah, pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, dan identifikasi serta pengembangan varietas sayuran dan buah unggulan/strategis di Sumatera Selatan.
2. Pengembangan Food Estate/Kawasan Satuan Produksi Pangan (KSPP) berbasis korporasi menjadi arah kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan rendahnya indeks pertanaman padi, lahan sawah yang belum termanfaatkan secara optimal, serta kecenderungan konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Melalui pendekatan korporasi, lahan pertanian dapat dikelola secara terintegrasi dan efisien, meningkatkan intensitas tanam, serta memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia. Selain itu, pengembangan Food Estate/KSPP juga berperan menjaga kelestarian lahan sawah produktif dan meminimalkan alih fungsi lahan, sehingga stabilitas produksi pangan dapat terjaga dan ketahanan pangan daerah semakin kuat.
3. Pemenuhan ketentuan 1 Desa 1 Penyuluh bertujuan meningkatkan kapasitas pendampingan dan penyuluhan pertanian di tingkat desa untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani. Kebijakan ini relevan untuk mengatasi permasalahan rendahnya indeks pertanaman padi, lahan sawah yang belum termanfaatkan secara optimal, pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan yang masih rendah, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dampak perubahan cuaca dan iklim, serta ketimpangan akses petani kecil terhadap program pertanian. Dengan adanya penyuluh di setiap desa, petani mendapatkan bimbingan teknis, akses terhadap benih dan teknologi, informasi pengendalian hama dan adaptasi perubahan iklim, serta pendampingan dalam memanfaatkan program pembangunan pertanian secara merata. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan pemanfaatan lahan, dan memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.
4. Penguatan kebijakan perlindungan lahan pertanian bertujuan menjaga ketersediaan dan keberlanjutan lahan pertanian produktif di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ini relevan untuk mengatasi permasalahan adanya kecenderungan konversi lahan pertanian ke non-pertanian dan lahan sawah yang belum termanfaatkan secara optimal. Dengan penguatan regulasi, pengawasan, serta pemberdayaan masyarakat dan petani, lahan sawah produktif dapat dilindungi dari alih fungsi, dimanfaatkan

secara optimal, dan dikelola berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan memastikan stabilitas produksi pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

5. Adaptasi terhadap perubahan iklim bertujuan mengurangi risiko dan dampak perubahan cuaca ekstrem terhadap sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ini relevan untuk mengatasi permasalahan terkait kecenderungan perubahan cuaca dan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang meningkat akibat perubahan iklim, rendahnya indeks pertanaman padi yang rentan terhadap gangguan iklim, serta pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan yang adaptif terhadap kondisi iklim. Melalui penyediaan teknologi dan varietas yang tahan terhadap iklim ekstrem, pendampingan petani dalam pengelolaan risiko OPT, serta penerapan praktik pertanian adaptif, diharapkan produktivitas pertanian dapat terjaga dan ketahanan pangan daerah semakin kuat.
6. Pemberdayaan dan pelatihan petani, termasuk wanita tani, bertujuan meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan akses petani terhadap teknologi, praktik pertanian, dan program pembangunan pertanian. Kebijakan ini relevan untuk mengatasi permasalahan rendahnya indeks pertanaman padi, lahan sawah yang belum termanfaatkan secara optimal, pemenuhan kebutuhan benih tanaman pangan yang masih rendah, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), kecenderungan perubahan cuaca dan iklim, serta ketimpangan akses petani kecil terhadap program pertanian. Melalui pelatihan teknis, pendampingan, dan pemberdayaan kelembagaan petani, diharapkan petani mampu meningkatkan produktivitas, mengelola lahan secara optimal, mengatasi serangan OPT, beradaptasi dengan perubahan iklim, serta memanfaatkan program pembangunan pertanian secara merata.

H. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

I. Nilai Tukar Petani

a. Sub Sektor Tanaman Pangan

b. Sub Sektor Hortikultura

II. Tanaman Pangan

a. Komoditi Padi

b. Komoditi Jagung

III. Tanaman Hortikultura

a. Komoditi Cabai Besar

IV. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusi

V. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 :

Tabel 1. Tujuan Sasaran, Indikator, Indikator Tujuan OPD, Indikator Sasaran OPD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Indikator Tujuan OPD	Indikator Sasaran OPD
<u>Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura</u>	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Nilai Tukar Petani : - Sub Sektor Tanaman Pangan - Sub Sektor Tanaman Hortikultura Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan : - Padi (%) - Jagung (%) Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura : - Cabai Besar (%)	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan - Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura

Tujuan dan Sasaran Strategis dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan beserta indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan, Sasaran Rencana Strategis beserta Indikator Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Nilai Tukar Petani :					
			- Sub Sektor Tanaman Pangan	100,50	100,50	101,00	101,00	101,05
			- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	100,00	100,05	100,10	100,15	100,20
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :					
			- Padi (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			- Jagung (%)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :					
			- Cabai Besar (%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2025-2029 di atas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai.

Tabel 3. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	Target Kinerja Tahun 2025
				Tahun 2025	
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Nilai Tukar Petani :		
			- Sub Sektor Tanaman Pangan	100,50	
			- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	100,00	
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :		
			- Padi (%)	5,00	3.054.882 Ton
			- Jagung (%)	2,50	854.801 Ton
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :		
			- Cabai Besar (%)	10,00	19.347 Ton

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya dapat ditunjukkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah. Indikator kinerja output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, yaitu produksi dan produktivitas. Indikator *outcome* yang digunakan juga bervariasi, seperti peningkatan produksi, peningkatan produktivitas, jumlah peningkatan perluasan tanam, peningkatan pendapatan petani dan sebagainya.

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan berhasil memacu pertumbuhan sektor pertanian secara nyata yang berdampak pada penguatan ketahanan pangan provinsi dan kontribusi terhadap target nasional swasembada pangan. Provinsi Sumatera Selatan mencatat peningkatan signifikan pada sektor produksi pangan utama, khususnya komoditas padi dan beras. Produksi padi mencapai sekitar 3,60 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), meningkat sekitar 23-24 persen dibandingkan tahun 2024. Capaian ini menjadikan Sumatera Selatan sebagai provinsi dengan peningkatan produksi padi tertinggi ke-3 di Indonesia. Luas panen padi di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sekitar 636,3 ribu hektar. Angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, yaitu bertambah lebih dari 115 ribu hektare atau sekitar 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Bertambahnya luas panen tersebut turut berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi padi secara keseluruhan dan memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah penopang produksi pangan nasional.

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mencatat realisasi penyaluran pupuk subsidi sekitar 82 persen dari total alokasi hingga Desember 2025. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaan sarana produksi bagi petani di tingkat lapangan. Penyaluran pupuk subsidi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran musim tanam, menjaga produktivitas tanaman, serta meningkatkan hasil panen. Melalui distribusi yang terpantau dan terkoordinasi, kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi secara lebih tepat sasaran sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah.

I. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi operasional indikator kinerja digunakan untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi. Definisi ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja. Definisi operasional memuat pengertian indikator, cara pengukuran, serta satuan yang digunakan dalam penghitungan capaian kinerja.

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) serta indikator persentase peningkatan produksi beberapa komoditas strategis.

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan atau daya beli petani tanaman pangan. Indikator ini dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani dari hasil penjualan produk pertanian dengan indeks harga yang dibayar petani untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan biaya produksi pertanian. Nilai NTP dinyatakan dalam bentuk indeks dengan angka dasar 100.

2. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Hortikultura

Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani hortikultura yang dihitung berdasarkan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani hortikultura dengan indeks harga yang dibayar petani hortikultura. Nilai NTP dinyatakan dalam bentuk indeks dengan angka dasar 100.

3. Persentase Peningkatan Produksi Padi

Persentase peningkatan produksi padi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan jumlah produksi padi pada tahun berjalan dibandingkan dengan produksi padi pada tahun sebelumnya. Produksi padi dihitung berdasarkan total hasil panen dalam satu tahun dalam satuan ton Gabah Kering Giling (GKG). Indikator ini dinyatakan dalam persentase (%).

4. Persentase Peningkatan Produksi Jagung

Persentase peningkatan produksi jagung merupakan indikator yang menunjukkan perubahan jumlah produksi jagung pada tahun berjalan dibandingkan dengan produksi

jagung pada tahun sebelumnya. Produksi jagung dihitung berdasarkan total hasil panen jagung dalam satu tahun dalam satuan ton dan dinyatakan dalam persentase (%).

5. Persentase Peningkatan Produksi Cabai Besar

Persentase peningkatan produksi cabai besar merupakan indikator yang menggambarkan perubahan jumlah produksi cabai besar pada tahun berjalan dibandingkan dengan produksi cabai besar pada tahun sebelumnya. Produksi cabai besar dihitung berdasarkan total hasil panen cabai besar dalam satu tahun dalam satuan ton dan dinyatakan dalam persentase (%)

II. Analisis Atas Capaian Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2025, implementasi Rencana Strategis 2025 – 2029 mencakup pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan dalam 4 (empat) program untuk mendukung 1 (satu) sasaran strategis. Capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	CAPAIAN KINERJA S/D	TARGET KINERJA TAHUN 2025 (TON)	CAPAIAN TAHUN 2025 (TON)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Nilai Tukar Petani :				
			- Sub Sektor Tanaman Pangan	100,50	100,85	-	-
			- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	100,00	94,85	-	-
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :				
			- Padi (%)	5,00	26,04	3.054.882	3.586.332,1
			- Jagung (%)	2,50	(23,59)	854.801	637.214,02
			Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :				
			- Cabai Besar (%)	10,00	31,13	19.347	22.502,09

Keterangan :

Data Realisasi Per 31 Desember 2025

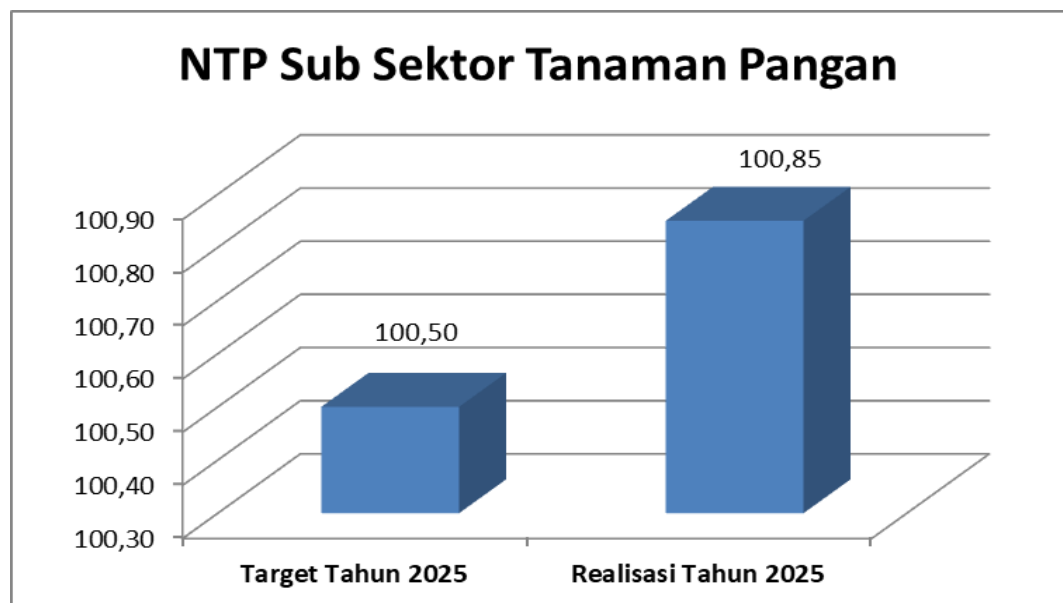
Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Nilai Tukar Petani :										
	Sub Sektor Tanaman Pangan									100,50	100,85
	Sub Sektor Tanaman Hortikultura									100,00	94,85
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :										
	Padi (ton)	5.450.825	2.555.443	3.543.061	2.775.069	3.943.061	2.832.774	2.846.938	2.845.271	3.054.882	3.586.332,17
	Jagung (ton)	1.164.426	954.025	943.537	889.693	963.375	826.836	768.706	833.952,21	854.801	637.215,02
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :										
	Cabai Besar (ton)	48.986	23.556	23.419	25.497	24.303	15.099	15.285	17.160,60	19.347	22.502,09

a. Nilai Tukar Petani

Nulai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani dengan membandingkan harga produk pertanian (sub sektor tanaman pangan dan sub sektor hortikultura) yang dihasilkan dengan barang/ jasa yang dibeli. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian (sub sektor tanaman pangan dan sub sektor hortikultura) terhadap konsumsi rumah tangga dan biaya produksi.

Fungsi dari Nulai Tukar Petani (NTP) sendiri salah satunya untuk mengukur indikator kesejahteraan para petani dan mengukur tingkat kemakmuran petani secara langsung. NTP juga berfungsi menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan sektor pertanian agar mensejahterakan para petani.

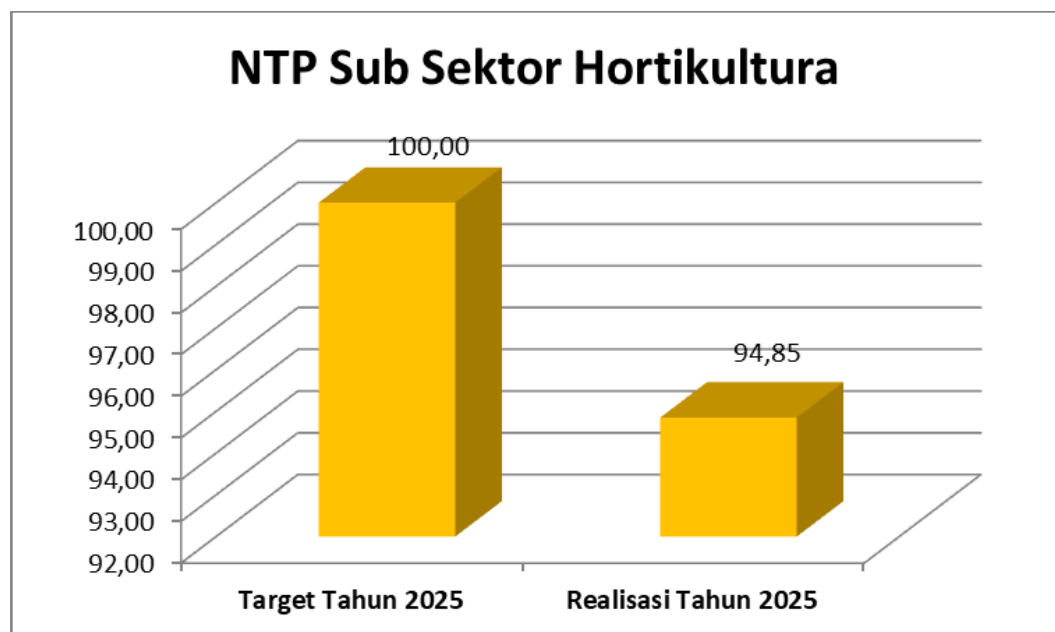
1) Sub Sektor Tanaman Pangan



Gambar 4. Grafik Capaian NTP Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2025 terhadap Target NTP Sub Sektor Tanaman Pangan Tahun 2025 berdasarkan Target Renstra

Dari diagram NTP Sub Sektor Tanaman Pangan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025 target NTP ditetapkan sebesar 100,50, sementara realisasinya mencapai 100,85. Hal ini menandakan bahwa capaian NTP berhasil melampaui target yang telah direncanakan dengan selisih sekitar 0,35 poin. Pencapaian NTP yang berada di atas angka 100 mengindikasikan kondisi daya beli petani yang relatif baik, di mana harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja sub sektor tanaman pangan pada tahun 2025 tergolong positif dan mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani.

2) Sub Sektor Hortikultura



Gambar 5. Grafik Capaian NTP Sub Sektor Hortikultura Tahun 2025 terhadap Target NTP Sub Sektor Hortikultura Tahun 2025 berdasarkan Target Renstra

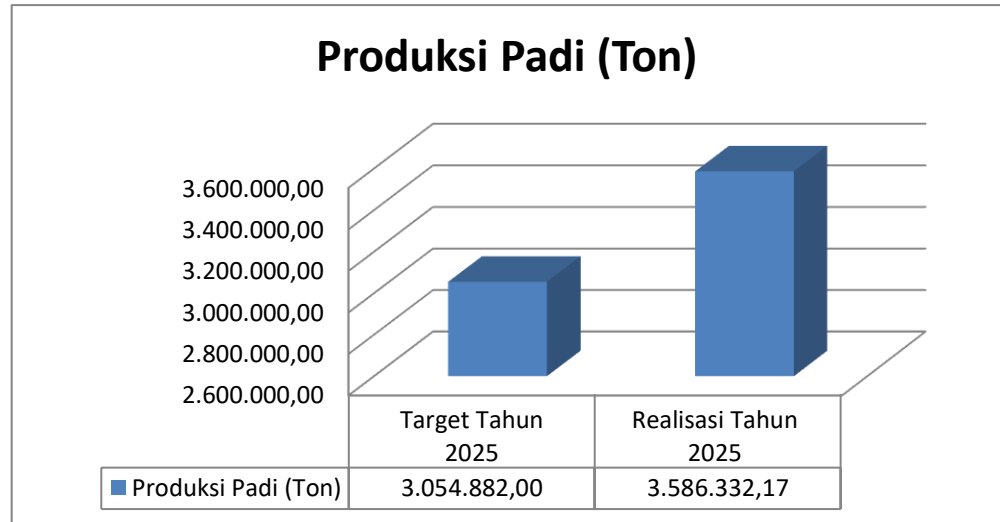
Pada diagram NTP Sub Sektor Hortikultura menunjukkan bahwa pada tahun 2025 target NTP ditetapkan sebesar 100,00, namun realisasi yang dicapai hanya sebesar 94,85. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian NTP sub sektor hortikultura belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan selisih penurunan sekitar 5,15 poin. Nilai NTP yang berada di bawah angka 100 menandakan bahwa daya beli petani hortikultura relatif menurun, karena indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan indeks harga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, kinerja sub sektor hortikultura pada tahun 2025 masih perlu mendapatkan perhatian dan penguatan kebijakan agar kesejahteraan petani dapat ditingkatkan.

b. Tanaman Pangan

1) Komoditi Padi

➤ Capaian Tahun 2025

Capaian produksi padi tahun 2025 berdasarkan Target Renstra dapat dilihat pada Gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Target Produksi Padi Tahun 2025 berdasarkan Target Renstra

Capaian kinerja produksi pada tahun 2025 berdasarkan Angka Sementara yaitu sebesar 3.586.332,17 Ton GKG. Tahun 2025 ini target produksi Padi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 3.054.882 Ton GKG (5,00%). Karena masih merupakan angka sementara, namun jika dibandingkan capaian tahun lalu sudah lebih besar. Jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 berupa persentase peningkatan produksi komoditi padi dengan target sebesar 5,00%, maka capaian persentase peningkatan produksi padi sudah tercapai. Sebagaimana capaian produksi padi tahun 2024 dan 2025 pada Tabel 4, peningkatan padi tahun 2025 terhadap tahun 2024 sebesar 26,04%. Capaian ini sudah mencapai target 5,00%.

Produksi padi di Tahun 2025 mendapat dari Dukungan Pemerintah melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya :

➤ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Padi

2. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

- Perbanyak Benih Unggul Padi di Balai Benih Induk

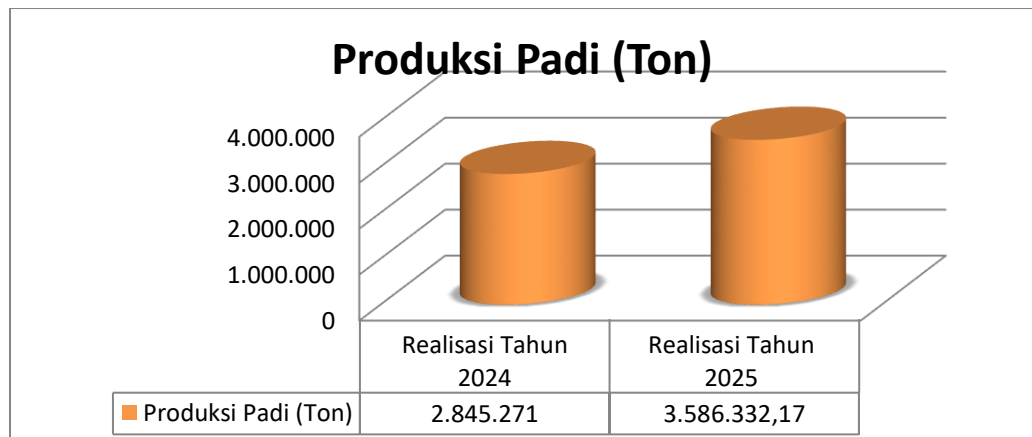
Bantuan Benih Padi Label Biru di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan total luas bantuan sebesar 15.000 Ha. Kabupaten Banyuasin menerima alokasi terbesar yaitu 5.593 Ha, OKU Timur sebesar 4.087 Ha dan Ogan Komering Ilir seluas 1.500 Ha. Ogan Ilir dan Muara Enim masing-masing memperoleh 1.000 Ha. Sementara itu, Musi Rawas menerima 705 Ha, Penukal Abab Lematang Ilir 665 Ha, dan Musi Banyuasin mendapatkan alokasi yaitu 450 Ha. Data ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan difokuskan terutama pada wilayah dengan kabutuhan atau potensi areal tanam padi yang lebih luas, khususnya di Kabupaten Banyuasin dan OKU Timur.



Gambar 7. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Padi Tahun 2025

- Capaian Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 :

Perbandingan antara capaian kinerja produksi tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 8 berikut ini.



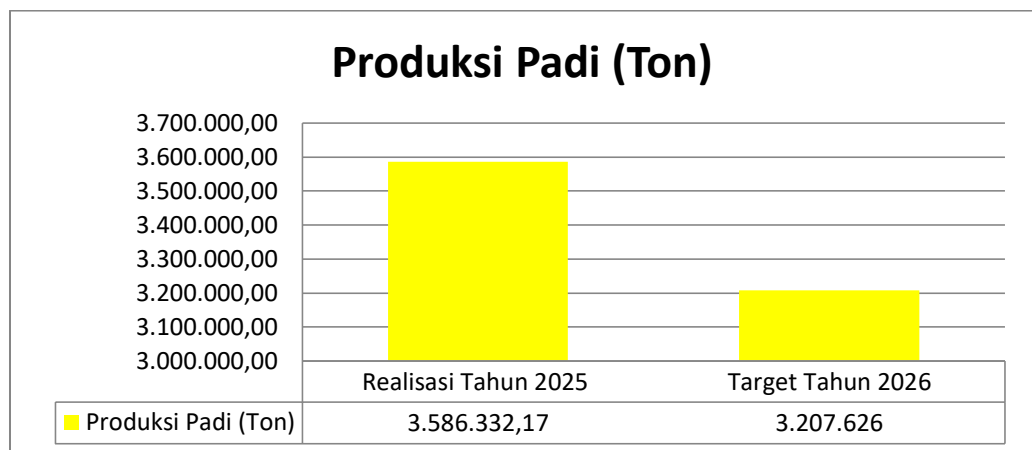
Gambar 8. Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Capaian Produksi Padi Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 8, produksi padi tahun 2025 yang melebihi dari produksi padi tahun 2024. Hal ini dikarenakan adanya penerapan teknologi spesifik lokasi, penggunaan alsintan pertanian untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi susut hasil serta adanya pendampingan dari tenaga pendamping di Lapangan (PPEP).

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir (tahun 2021-2024), capaian produksi tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan capaian tahun 2021-2024. Adanya peningkatan capaian ini salah satunya karena adanya prioritas dukungan program dan kegiatan dari Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

➤ **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2026 :**

Grafik perbandingan capaian produksi dan target produksi padi tahun 2026 berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Gambar 9.

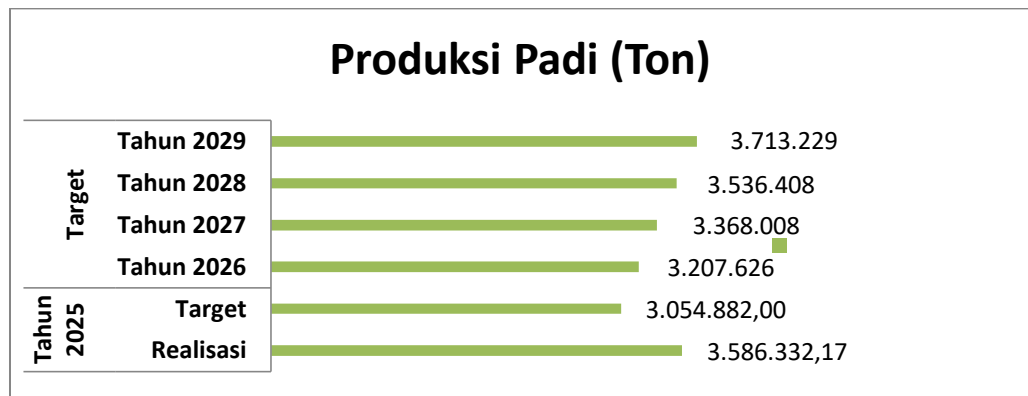


Gambar 9. Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Target Produksi Padi Tahun 2026 berdasarkan Renstra 2025-2029

Gambar 9 menunjukkan bahwa capaian produksi padi tahun 2025 sudah mencapai target 2026. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tetap melakukan pengawalan penambahan jumlah tanam di sentra produk padi disemua tipe lahan. Bantuan Padi dan Saprodi di tahun 2026 tetap dialokasikan meskipun adanya efisiensi anggaran. Pendampingan atau pengawalan/ koordinasi dari tim teknis dinas provinsi dan kabupaten serta dari BPS Provinsi dan Kabupaten.

➤ **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Renstra 2025-2029 :**

Grafik perbandingan capaian produksi tahun 2025 terhadap target jangka panjang (Renstra tahun 2025-2029) dapat dilihat pada Gambar 10.

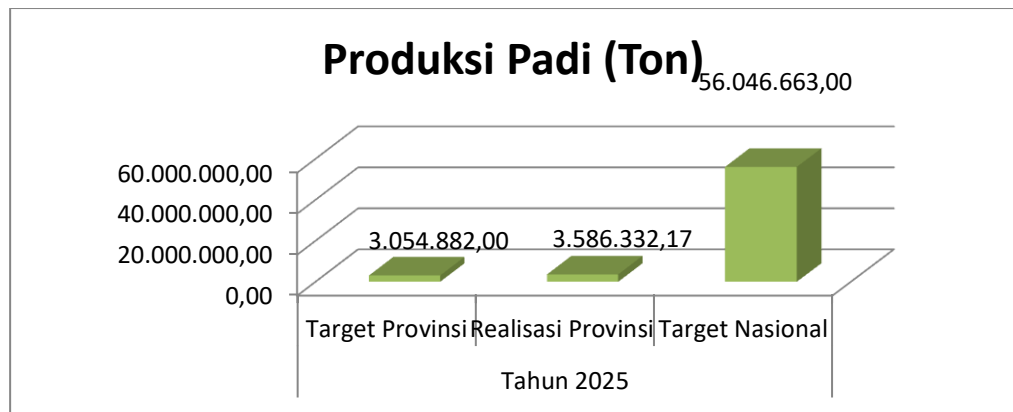


Gambar 10. Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Target Produksi Padi Jangka Panjang Renstra 2025-2029

Bila dilihat dari capaian produksi padi tahun 2025 per 31 Desember 2025 terhadap target produksi 2025 sudah tercapai, begitu juga dengan target produksi 2026 sampai 2028 sudah tercapai. Penetapan target tersebut akan dilakukan kaji ulang. Upaya tetap dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka peningkatan produksi baik dengan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) maupun APBD Provinsi.

➤ **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Nasional :**

Grafik perbandingan capaian produksi tahun 2025 terhadap target nasional dapat dilihat pada Gambar 11.



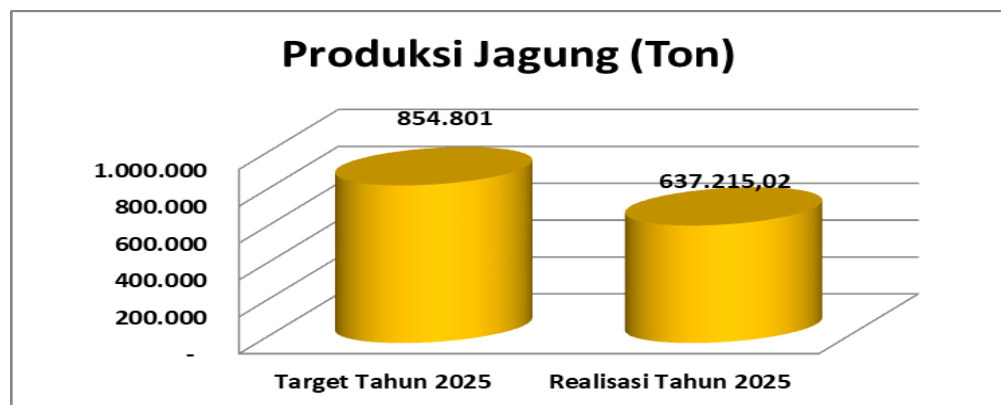
Gambar 11. Grafik Capaian Produksi Padi Tahun 2025 terhadap Target Nasional

Jika dilihat dari capaian produksi per 31 Desember 2025 sudah mencapai target provinsi tetapi terhadap target nasional capaian produksi padi Provinsi Sumatera Selatan hanya sebesar 6,40%. Sedangkan dari sisi urutan, Provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam 5 (lima) besar produksi padi tertinggi nasional.

2) Komoditi Jagung

➤ Capaian Tahun 2025 :

Capaian produksi jagung dapat dilihat pada Gambar 12 berikut ini



Gambar 12. Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Target Produksi Jagung Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

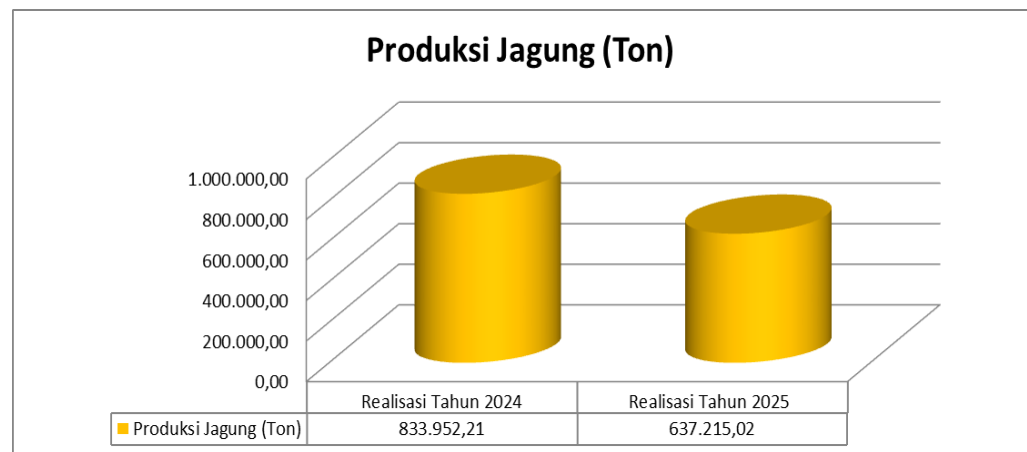
Berdasarkan Gambar 12, capaian produksi jagung tahun 2025 belum mencapai target. Tidak tercapainya target 2025 salah satunya dikarenakan petani memprioritaskan penanaman padi saja. Disamping itu juga tidak tercapainya target produksi jagung disebabkan oleh dan sedikitnya bantuan benih pada komoditas jagung sendiri.



Gambar 13. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Jagung Tahun 2025

• **Capaian Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 :**

Perbandingan capaian produksi jagung tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 14 berikut ini.

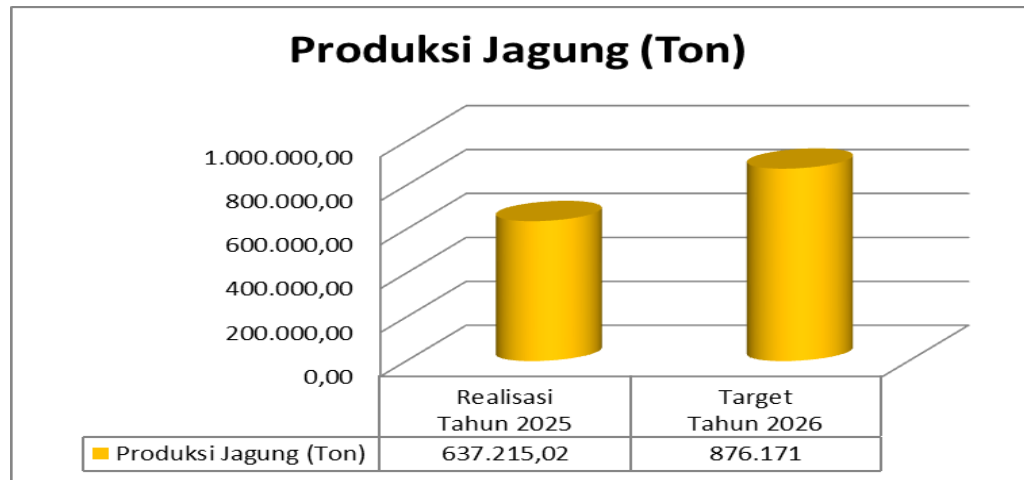


Gambar 14. Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Capaian Produksi Jagung Tahun 2024

Capaian produksi jagung tahun 2025 berdasarkan Angka Sementara lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Produksi Jagung Tahun 2024 (Gambar 12). Hal ini belum melampaui realisasi Produksi Jagung tahun 2024 yang artinya produksi Jagung mengalami penurunan. Disamping itu juga tidak tercapainya target produksi jagung disebabkan oleh dan sedikitnya bantuan benih pada komoditas jagung sendiri.

- **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2026:**

Grafik perbandingan capaian produksi tahun 2025 terhadap target produksi jagung tahun 2026 berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 15.

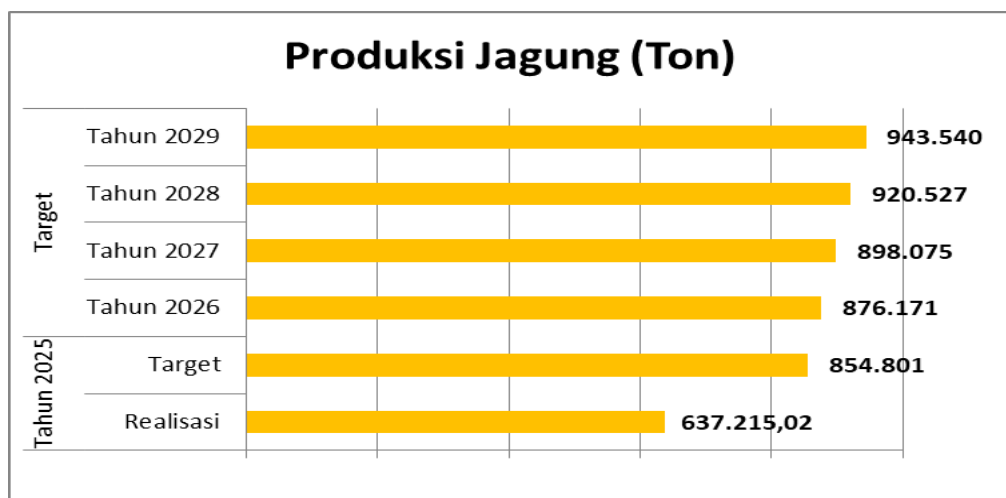


Gambar 15. Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Target Produksi Jagung Tahun 2026 berdasarkan Renstra 2025-2029

Capaian produksi jagung tahun 2025 seperti terlihat pada Gambar 15 tidak mencapai target produksi jagung tahun 2026 berdasarkan Renstra 2025-2029. Dari capaian tahun 2025, target produksi jagung tahun 2026 tidak terlampaui. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan dinas pertanian kabupaten/kota untuk terus mengawal capaian produksi jagung.

- **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Jangka Panjang Renstra 2025-2029 :**

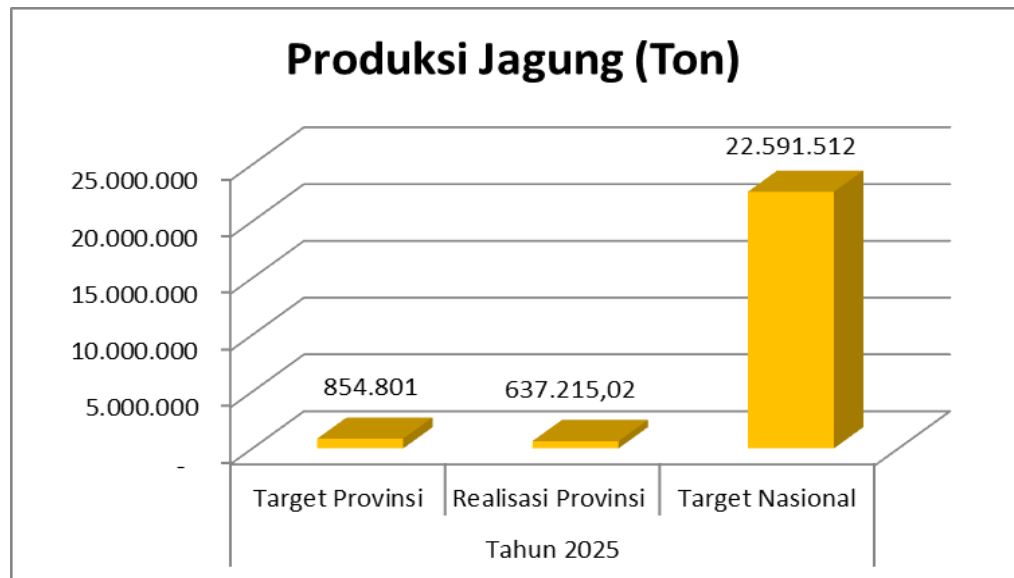
Grafik perbandingan capaian produksi tahun 2024 terhadap target jangka menengah (Renstra tahun 2024-2026) dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Target Produksi Jagung Jangka Menengah Renstra 2025-2029

- **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Nasional :**

Grafik perbandingan capaian produksi tahun 2025 terhadap target nasional dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Grafik Capaian Produksi Jagung Tahun 2025 terhadap Target Nasional

Jika dilihat dari capaian produksi per 31 Desember 2025 terhadap target nasional, maka capaian produksi jagung Provinsi Sumatera Selatan hanya sebesar 2,82% dari target nasional.

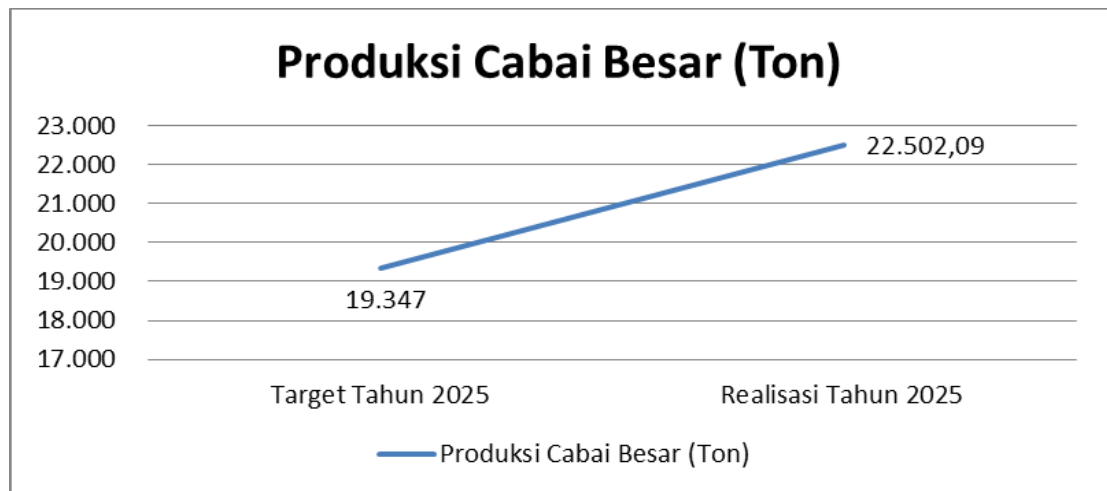
c. Tanaman Hortikultura

Tanaman pangan dan hortikultura memiliki peranan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman pangan yaitu semua model tanaman yang didalamnya ada karbohidrat serta protein sebagai sumber makanan bagi manusia. Hortikultura merupakan cabang dari pertanian tanaman yang berhubungan dengan tanaman perkarangan, umumnya adalah sayur-sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias.

Komoditi Tanaman Hortikultura yang menjadi salah satu indikator kinerja utama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu Cabai Besar. Capaian yang dapat dilihat dari komoditi tersebut yaitu dari capaian produksi dan produktivitas. Terdapat beberapa target dan capaian yang dapat disandingkan dengan capaian produksi dan produktivitas tanaman hortikultura ini, yaitu:

1) Komoditi Cabai Besar

➤ Capaian Produksi Komoditi Cabai Besar Tahun 2025 terhadap Target Produksi Tahun 2025



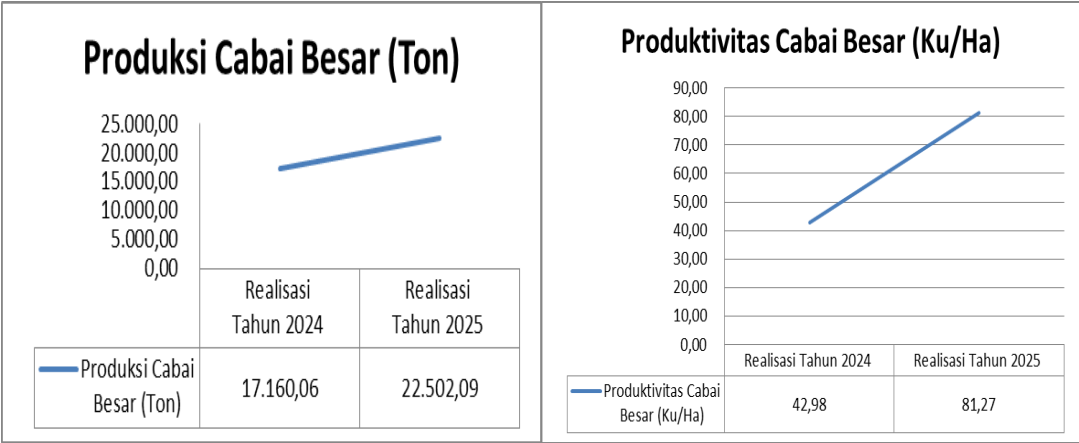
Gambar 18. Grafik Capaian Produksi Komoditi Cabai Besar pada Tahun 2025 terhadap target Produksi Tahun 2025

Berdasarkan Gambar 18 dapat dilihat bahwa capaian kinerja produksi cabai besar tahun 2025 sebesar 22.502,09 ton dari target sebesar 19.347 ton, sehingga pencapaian produksi adalah 85,98% dari target yang ditentukan. Untuk capaian produktivitas cabai berah sebesar 81,27 ku/ha. Namun, jika dilihat dari target IKU produksi komoditi cabai besar sebesar 10,00%, maka capaian IKU sebesar 31,13%.

Peningkatan Produksi Tanaman Cabai Besar disebabkan oleh meningkatnya minat petani hortikultura untuk menanam komoditi cabai. Selain itu juga dengan adanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut mendorong meningkatnya produksi tanaman cabai. Disamping itu juga adanya kegiatan APBD tahun 2025 berupa Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Sayuran yaitu Komoditi Cabai Merah seluas 2 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ulu, 2 Ha di Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin.

➤ Capaian Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 :

Perbandingan capaian produksi dan produktivitas tahun 2025 dan tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 19 berikut ini.



Gambar 19. Grafik Capaian Produksi dan Produktivitas Komoditi Cabai Besar pada Tahun 2025 dan Tahun 2024

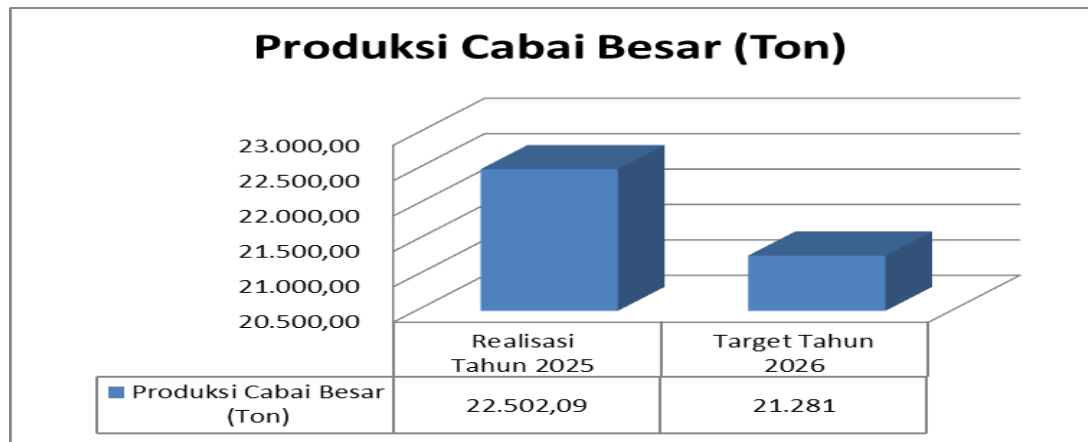
Berdasarkan Gambar 19, dapat dilihat bahwa capaian produksi cabai besar pada tahun 2025 adalah 22.502,09 Ton dan pada tahun 2024 sebesar 17.160,06 Ton, yang berarti terjadi peningkatan capaian produksi cabai besar sebesar 5.342,03 Ton. Sedangkan produktivitas cabai besar pada tahun 2025 adalah 81,27 Ku/Ha dan pada tahun 2024 sebesar 42,98 Ku/Ha yang berarti terjadi peningkatan sebesar 38,29 Ku/Ha. Hal tersebut salah satunya didukung oleh adanya pemanfaatan bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan di tingkat petani, serta meningkatnya kemampuan kelompok tani/masyarakat dalam mitigasi Dampak Perubahan Iklim, dan kurangnya tingkat ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah.



Gambar 20. Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura (Cabai Besar) Tahun 2025

➤ **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2026 :**

Perbandingan capaian produksi cabai besar tahun 2025 dan tahun 2026 dapat dilihat pada Gambar 21 berikut ini.

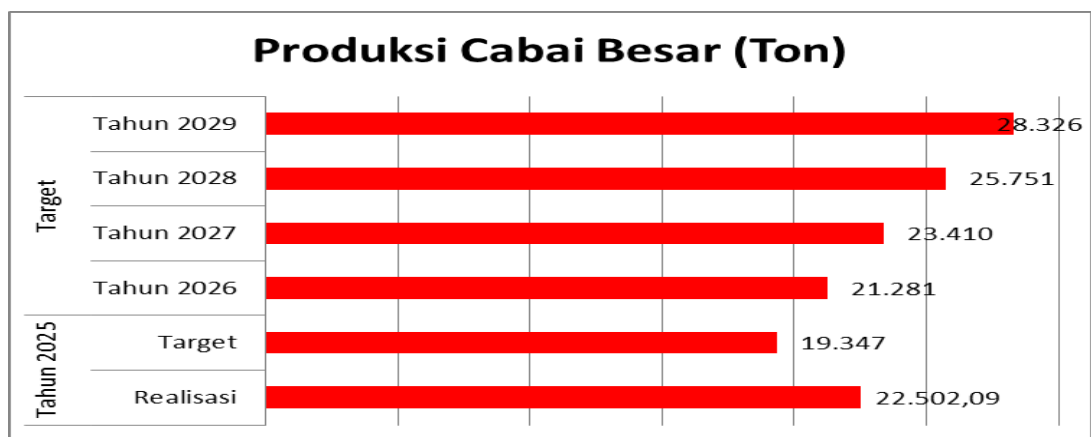


Gambar 21. Grafik Capaian Produksi Komoditi Cabai Besar pada Tahun 2025 terhadap Target Tahun 2026

Capaian produksi Cabai Besar tahun 2025 seperti terlihat pada Gambar 21 melampaui target produksi tahun 2026 berdasarkan Renstra 2025-2029. Peningkatan Produksi Tanaman Cabai Besar disebabkan oleh meningkatnya minat petani hortikultura untuk menanam komoditi cabai. Selain itu juga dengan adanya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ikut mendorong meningkatnya produksi tanaman cabai besar. Pada tahun 2026 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mendorong peningkatan produksi komoditi cabai besar telah mengalokasikan kegiatan penyediaan sarana produksi hortikultura untuk komoditi cabai besar seluas 2 Ha.

➤ **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Renstra 2025-2029 :**

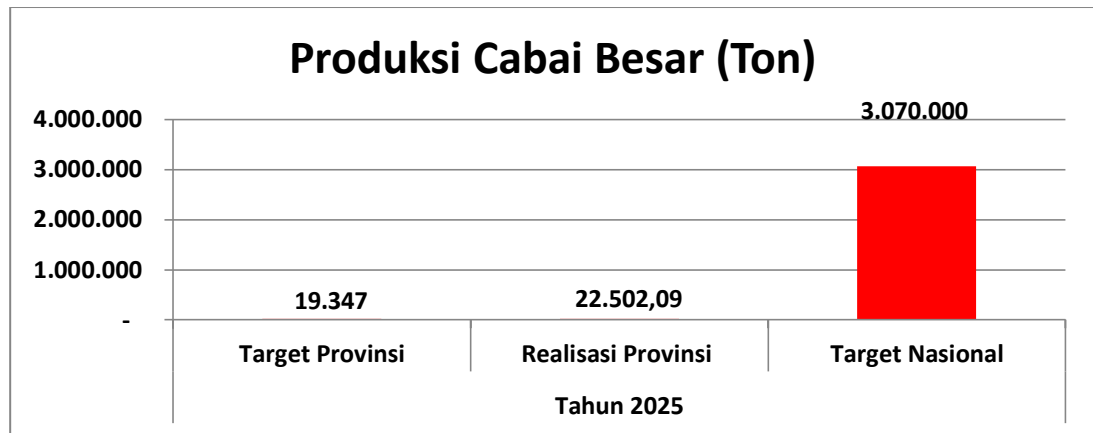
Grafik perbandingan capaian produksi tahun 2025 terhadap target Renstra tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Grafik Capaian Produksi Cabai Besar Tahun 2025 terhadap Target Produksi Cabai Besar Renstra 2025-2029

➤ **Capaian Tahun 2025 terhadap Target Nasional :**

Grafik perbandingan capaian produksi tahun 2025 terhadap target nasional dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Grafik Capaian Produksi Cabai Besar Tahun 2025 terhadap Target Nasional

Jika dilihat dari capaian produksi terhadap target nasional, maka capaian produksi cabai besar Provinsi Sumatera Selatan hanya sebesar 0,73% dari target nasional.

III. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan serta Alternatif Solusi

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan

Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik. Target NTP yang ditetapkan sebesar 100,50 dapat direalisasikan sebesar 100,85, maka capaian tahun 2025 sebesar 100,35% ($100,85 / 100,50 \times 100\%$). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan petani tanaman pangan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluarannya, sehingga mencerminkan kondisi ekonomi petani yang relatif menguntungkan. Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan tanaman pangan yang didukung oleh penyediaan sarana produksi pertanian serta koordinasi dan pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Hortikultura

Capaian Nilai Tukar Petani pada sub sektor hortikultura pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Target NTP sebesar 100,00 hanya terealisasi sebesar 94,85. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli petani hortikultura masih berada di bawah kondisi ideal karena harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi.

Kegagalan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti fluktuasi harga komoditas hortikultura, meningkatnya biaya sarana produksi, serta kondisi pasar yang kurang stabil sehingga mempengaruhi pendapatan petani hortikultura.

3. Persentase Peningkatan Produksi Padi

Produksi padi tahun 2025 sebesar 3.586.332,17 ton, sedangkan tahun 2024 sebesar 2.845.271 ton. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan produksi padi sebesar 26,04%. Jika dibandingkan dengan target persentase peningkatan produksi padi tahun 2025 sebesar 5,00%, maka capaian tahun 2025 sebesar 520,8% ($26,04\% / 5,00\% \times 100\%$) Indikator peningkatan produksi padi pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan produksi padi disebabkan oleh penanaman yang sesuai dengan bulan tanam yang dipersyaratkan untuk tanaman padi sehingga untuk kebutuhan tanam padi dapat terpenuhi dan tercukupi selama proses produksi padi di seluruh lahan yang ditanami padi oleh petani.

4. Persentase Peningkatan Produksi Jagung

Capaian peningkatan produksi jagung pada tahun 2025 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target peningkatan produksi sebesar 2,50% justru mengalami penurunan sebesar 23,59%. Kegagalan pencapaian indikator ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena petani lebih memprioritaskan penanaman padi dibandingkan dengan jagung sehingga luas tanam jagung menjadi berkurang. Selain itu, keterbatasan bantuan benih jagung juga menjadi faktor yang mempengaruhi menurunnya produksi komoditas tersebut. Kondisi ini menyebabkan produksi jagung pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Persentase Peningkatan Produksi Cabai Besar

Indikator peningkatan produksi cabai besar pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik karena berhasil melampaui target yang ditetapkan. Produksi cabai besar tahun 2025 sebesar 22.502,09 ton, sedangkan tahun 2024 sebesar 17.160,06 ton. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan produksi cabai besar sebesar 31,13%. Jika dibandingkan dengan target persentase peningkatan produksi cabai besar tahun 2025 sebesar 10,00%, maka capaian tahun 2025 sebesar 311,3% ($31,13\% / 10,00\% \times 100\%$). Hal tersebut salah satunya didukung oleh adanya pemanfaatan bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan di tingkat

petani, serta meningkatnya kemampuan kelompok tani/masyarakat dalam mitigasi Dampak Perubahan Iklim, dan kurangnya tingkat ketergantungan petani terhadap bantuan pemerintah.

Solusi untuk pencapaian kinerja, diantaranya tetap melakukan pendampingan dan pengawalan kegiatan peningkatan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura secara massif di 17 kabupaten/ kota sentra produksi, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan OPD dan instansi/ stakeholder terkait.

IV. Analisis Alternatif Solusi

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan

Meskipun capaian Nilai Tukar Petani (NTP) sub sektor tanaman pangan telah melampaui target, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan agar kondisi kesejahteraan petani dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun berikutnya. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan terus meningkatkan produktivitas tanaman pangan melalui penyediaan sarana produksi pertanian yang memadai seperti benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kelembagaan kelompok tani, peningkatan akses pasar, serta pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada petani agar efisiensi usaha tani dapat meningkat dan pendapatan petani tetap stabil.

2. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Hortikultura

Capaian NTP hortikultura yang belum mencapai target perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan stabilitas harga komoditas hortikultura melalui penguatan sistem pemasaran dan distribusi hasil pertanian. Pemerintah juga perlu menekan biaya produksi dengan memberikan dukungan sarana produksi yang lebih efisien serta memperluas akses petani terhadap teknologi budidaya hortikultura yang lebih modern. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok tani dan peningkatan akses petani terhadap pasar juga perlu dilakukan agar harga jual komoditas hortikultura dapat lebih menguntungkan bagi petani.

3. Peningkatan Produksi Padi

Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian produksi padi yang telah melampaui target, pemerintah perlu terus melakukan pengawalan dan pendampingan

kepada petani di sentra produksi padi. Alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan mempertahankan penerapan teknologi budidaya yang tepat, meningkatkan penggunaan benih unggul dan alat mesin pertanian, serta memperluas program bantuan sarana produksi. Selain itu, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani juga perlu terus dilakukan agar program peningkatan produksi padi dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. Peningkatan Produksi Jagung

Penurunan produksi jagung perlu segera diatasi melalui berbagai upaya strategis. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan dukungan sarana produksi seperti bantuan benih unggul jagung, pupuk, serta teknologi budidaya yang sesuai dengan kondisi lahan. Selain itu, pemerintah perlu melakukan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan minat dalam menanam jagung serta mendorong peningkatan luas tanam di daerah sentra produksi. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan berbagai pemangku kepentingan juga sangat penting untuk memastikan program peningkatan produksi jagung dapat berjalan secara optimal.

5. Peningkatan Produksi Cabai Besar

Walaupun produksi cabai besar telah melampaui target, upaya peningkatan tetap perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas pasokan. Alternatif solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan mempertahankan dukungan program pemerintah seperti penyediaan sarana produksi hortikultura, meningkatkan kemampuan petani dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman secara ramah lingkungan, serta memperkuat kemampuan petani dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga perlu terus mendorong pengembangan usaha tani cabai melalui peningkatan keterampilan petani, penguatan kelompok tani, dan perluasan akses pasar.

V. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun sumber

dana. Perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran berdasarkan tujuan dan asasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran

No	Indikator Kinerja				Anggaran		
	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis						
a.	Nilai Tukar Petani :						
	- Sub Sektor Tanaman Pangan	100,50	100,85	100,35			
	- Sub Sektor Hortikultura	100,00	94,85	94,85			
b.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :						
	- Padi (%)	5,00	26,04	520,8	17.398.100.000	17.398.100.000	99,70
	- Jagung (%)	2,50	(23,59)	(943,6)	2.144.060.000	2.143.955.000	99,99
c	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :						
	- Cabai Besar (%)	10,00	31,13	311,3	651.500.000	622.772.000	98,90

Tabel 6. Tabel Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5 = 3-4
1.	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis			
a.	Nilai Tukar Petani :			
	- Sub Sektor Tanaman Pangan	100,35	-	100,35
	- Sub Sektor Hortikultura	94,85	-	94,85
b.	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :			
	- Padi (%)	520,8	99,70	42,11
	- Jagung (%)	(943,6)	99,99	(1.043,59)
c	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura :			
	- Cabai Besar (%)	311,3	98,90	212,4

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang menjadi prioritas alokasi anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu produksi padi dan produksi cabai besar. Jika dilihat dari komoditi padi, capaian kinerja sudah melampaui angka target capaian tersebut walaupun masih dalam angka sementara. Diharapkan akan terjadi peningkatan sesuai target jika sudah merupakan angka tetap (ATAP BPS).

Program kegiatan sebagian besar dialokasikan untuk peningkatan produksi padi supaya capaian produksi bisa tetap berada di 5 (lima) besar penghasil produksi padi nasional serta terus diupayakan untuk meningkat dan tidak tersalip Provinsi Lampung.

Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja produksi padi mempengaruhi kebijakan Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan

pengalokasikan dan penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.

Selain komoditi padi, cabe yang merupakan komoditi inflasi juga menjadi prioritas. Program kegiatan juga dialokasikan untuk mendukung capaian produksi cabe. Namun, swadaya petani sebagian besar menjadi pendukung tercapainya target produksi tahun 2025 meskipun angka capaian tersebut masih bersifat angka sementara. Untuk capaian kinerja pada komoditi yang lain dan juga indikator sasaran tambahan di tahun 2025, sebagian besar berasal dari swadaya petani, program kegiatan yang berasal dari anggaran pemerintah pusat dan anggaran pemerintah kabupaten/ kota setempat. Untuk koordinasi dan kolaborasi pemerintah baik di daerah maupun pusat serta petani sangat penting dalam mencapai target indikator kinerja Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan.

VI. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 7. Analisis Program/Kinerja yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian Kinerja	Tingkat Keberhasilan	Kontribusi Program	Keterangan
1	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	100,35%	Berhasil	Tinggi	Program mendukung peningkatan produktivitas dan pendapatan petani
2	Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Hortikultura	Program Pengembangan Hortikultura	Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Hortikultura	94,85%	Belum Berhasil	Sedang	Program telah dilaksanakan namun belum mampu mengatasi fluktuasi harga dan biaya produksi
3	Persentase Peningkatan Produksi Padi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	520,8%	Sangat Berhasil	Sangat Tinggi	Dukungan benih unggul dan sarana produksi sangat efektif meningkatkan produksi
4	Persentase Peningkatan Produksi Jagung	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Tanaman Pangan	-943,6%	Tidak Berhasil	Rendah	Program belum optimal karena keterbatasan benih dan minat petani
5	Persentase Peningkatan Produksi Cabai Besar	Program Pengembangan Hortikultura	Pengembangan Tanaman Sayuran	311,3%	Sangat Berhasil	Sangat Tinggi	Program dan minat petani sangat mendukung peningkatan produksi

Berdasarkan tabel analisis program/kegiatan terhadap pencapaian indikator kinerja tahun 2025, dapat dijelaskan keterkaitan antara pelaksanaan program dan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan

Capaian indikator ini sebesar 100,35% menunjukkan bahwa target kinerja telah berhasil dicapai. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui kegiatan pengawasan peredaran sarana pertanian. Program ini memberikan kontribusi tinggi karena mampu menjamin ketersediaan sarana produksi yang berkualitas sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Dengan demikian, program yang dilaksanakan telah efektif dalam menunjang peningkatan daya beli petani tanaman pangan.

2. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Hortikultura

Capaian indikator ini sebesar 94,85% menunjukkan bahwa target belum tercapai. Program Pengembangan Hortikultura melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan komoditas hortikultura telah dilaksanakan, namun kontribusinya masih dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas hortikultura dan meningkatnya biaya produksi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun program telah berjalan, dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani belum optimal.

3. Persentase Peningkatan Produksi Padi

Capaian indikator ini sangat tinggi yaitu sebesar 520,8% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, khususnya pada kegiatan penyediaan dan peredaran benih tanaman. Program ini memiliki kontribusi sangat tinggi karena penggunaan benih unggul serta dukungan sarana produksi secara langsung meningkatkan produktivitas dan luas tanam padi. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan sangat efektif dalam mendorong peningkatan produksi padi.

4. Persentase Peningkatan Produksi Jagung

Capaian indikator ini menunjukkan hasil yang tidak berhasil dengan nilai -943,6%, yang berarti terjadi penurunan produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Program yang dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan tanaman pangan belum memberikan kontribusi yang optimal, sehingga dikategorikan rendah. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan bantuan benih jagung serta menurunnya minat petani

dalam menanam jagung karena beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, diperlukan penguatan program agar lebih tepat sasaran dan mampu meningkatkan produksi jagung.

5. **Persentase Peningkatan Produksi Cabai Besar**

Capaian indikator ini sebesar 311,3% menunjukkan bahwa target kinerja telah terlampaui secara signifikan. Program Pengembangan Hortikultura melalui kegiatan pengembangan tanaman sayuran memberikan kontribusi sangat tinggi terhadap capaian ini. Dukungan sarana produksi, peningkatan keterampilan petani, serta meningkatnya minat petani dalam budidaya cabai menjadi faktor utama keberhasilan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan telah berjalan sangat efektif dalam meningkatkan produksi cabai besar.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa program yang berbasis penyediaan sarana produksi dan pengembangan komoditas strategis memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan pencapaian kinerja. Namun demikian, untuk indikator yang belum tercapai, diperlukan evaluasi dan penguatan program agar lebih adaptif terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan petani.

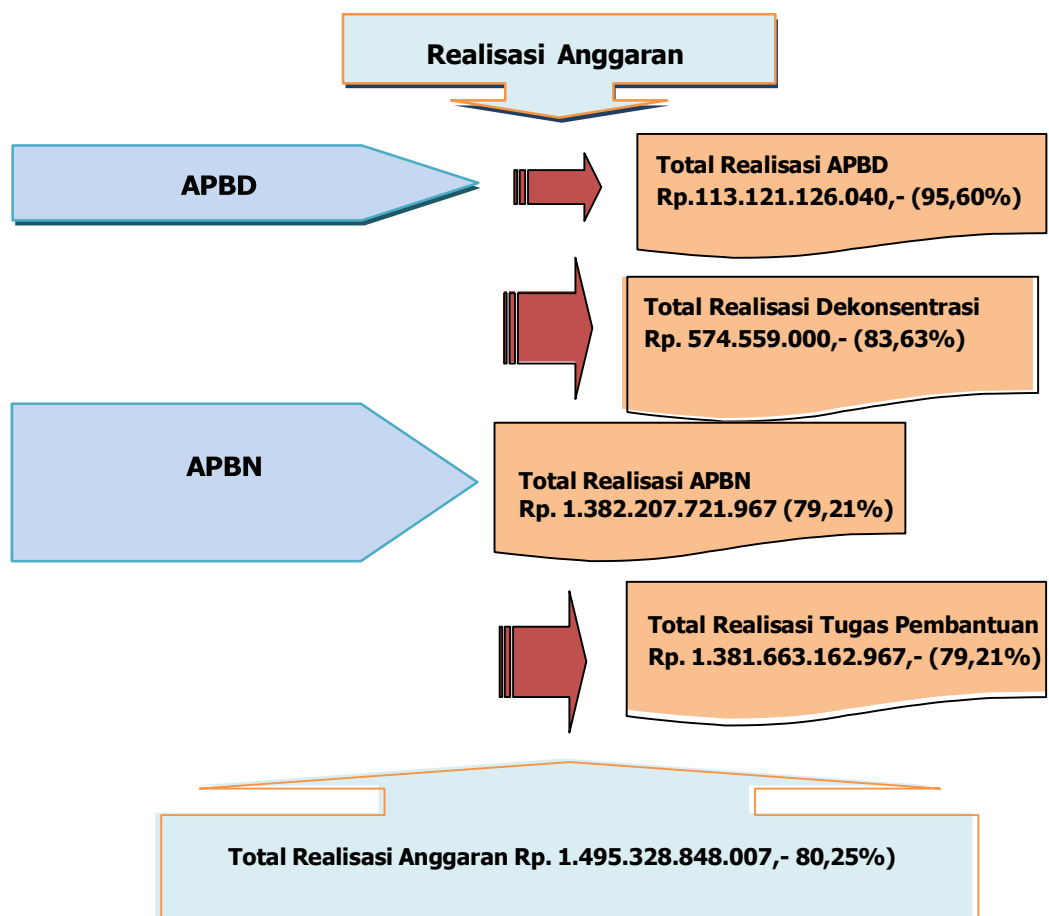
B. Realisasi Anggaran

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan 11 program (5 Program APBD, 6 Program APBN), 12 kegiatan APBD dan 12 Kegiatan APBN (4 kegiatan Dekonsentrasi, 8 kegiatan Tugas Pembantuan Provinsi).

Alokasi dana yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 118.329.350.730,-**, dan telah terealisasi sebesar **Rp. 113.121.126.040,-** atau 95,60%, dengan realisasi fisik 100%. Sedangkan alokasi anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar **Rp. 1.744.883.338.000,-** terdiri dari dana dekonsentrasi sebesar **Rp. 687.065.000,-**, dan dana tugas pembantuan provinsi sebesar **Rp. 1.744.196.273.000,-**. Realisasi keuangan untuk Dana APBN mencapai **Rp. 1.382.207.721.967,-** atau 79,21%, yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi mencapai **Rp. 574.559.000,-** atau 83,63%. Realisasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi mencapai **Rp. 1.381.633.162.967,-** atau 79,21%.



Gambar 24. Total Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025



Gambar 25. Total Realisasi Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian penutup dari LKjIP tahun 2025 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2025 belum semuanya mencapai target. Hal ini dikarenakan angka capaian masih menggunakan angka sementara. Namun, ada pada target kinerja produksi komoditi jagung yang belum melampaui target kinerja. Hal ini akan menjadi catatan bagi perencanaan untuk menetapkan target sasaran pada dokumen perencanaan berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dari sisi capaian indikator kinerja, sebagian besar indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator persentase peningkatan produksi padi dan cabai besar menunjukkan tingkat capaian yang sangat tinggi, yang mengindikasikan bahwa intervensi program berupa penyediaan sarana produksi, penggunaan benih unggul, penerapan teknologi pertanian, serta pendampingan kepada petani telah berjalan secara optimal dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi komoditas pertanian.

Sementara itu, indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Tanaman Pangan juga menunjukkan capaian yang baik dan mampu melampaui target, yang mencerminkan adanya peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani pada sub sektor tersebut. Hal ini tidak terlepas dari stabilitas harga komoditas serta dukungan program yang meningkatkan produktivitas usaha tani.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu pada indikator Nilai Tukar Petani Sub Sektor Hortikultura serta persentase peningkatan produksi jagung. Ketidaktercapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain fluktuasi harga komoditas hortikultura, meningkatnya biaya sarana produksi, serta berkurangnya minat petani dalam mengembangkan komoditas jagung dibandingkan komoditas lainnya yang lebih menguntungkan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa efektivitas program pada indikator tersebut masih perlu ditingkatkan.

Dari aspek penggunaan anggaran, secara umum menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi dan berada pada kategori efisien. Analisis efektivitas dan efisiensi menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian kinerja yang tinggi dengan tingkat penggunaan anggaran yang optimal. Hal ini tercermin dari rasio efektivitas kinerja terhadap penyerapan anggaran yang menunjukkan kategori sangat efektif pada indikator peningkatan produksi padi dan cabai besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi dan pemanfaatan anggaran pada indikator tersebut telah tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal.

Di sisi lain, pada indikator yang belum mencapai target, meskipun tingkat penyerapan anggaran relatif tinggi, capaian kinerja yang dihasilkan belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan program, alokasi anggaran, dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap desain program, mekanisme pelaksanaan, serta penentuan prioritas kegiatan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 telah mampu mendukung pencapaian sebagian besar target kinerja secara efektif dan efisien. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas kinerja pada tahun mendatang, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan kualitas perencanaan berbasis data dan kebutuhan lapangan, penguatan intervensi pada komoditas yang belum optimal, peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta optimalisasi pendampingan kepada petani guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya, sehingga pencapaian kinerja organisasi dapat lebih merata, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.

Jika dilihat dari realisasi program/ kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, pelaksanaan program/ kegiatan rata-rata sudah mencapai realisasi di atas 80% baik yang bersumber dana dari APBD maupun APBN. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tetap akan fokus pada percepatan pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan kinerja dan mendukung pelaksanaan pembangunan

pertanian di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang.

B. Langkah Strategis

Dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja serta menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menetapkan berbagai langkah strategis yang diarahkan pada perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Langkah strategis tersebut diawali dengan penguatan perencanaan berbasis kinerja melalui penyusunan program dan kegiatan yang lebih terarah, terukur, serta didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan, sehingga mampu mendukung pencapaian indikator kinerja secara optimal.

Selanjutnya, upaya peningkatan kinerja difokuskan pada indikator yang belum mencapai target, khususnya pada Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor Hortikultura dan peningkatan produksi jagung. Penguatan pada indikator tersebut dilakukan melalui peningkatan dukungan sarana produksi, pengembangan teknologi budidaya, serta mendorong peningkatan minat petani dalam mengembangkan komoditas yang menjadi prioritas daerah.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program, dilakukan pula optimalisasi pemanfaatan anggaran dengan memastikan adanya keterkaitan yang kuat antara alokasi anggaran dengan target kinerja yang ingin dicapai. Hal ini bertujuan agar setiap penggunaan anggaran dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Selain itu, peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian terus didorong melalui penggunaan benih unggul, penerapan teknologi pertanian modern, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Upaya ini juga didukung dengan optimalisasi pola tanam yang disesuaikan dengan kalender tanam dan kondisi agroklimat setempat.

Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada petani juga menjadi langkah strategis yang penting, melalui peningkatan peran penyuluh pertanian dalam memberikan edukasi, transfer teknologi, serta pendampingan dalam pengelolaan usaha tani. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor pertanian.

Di sisi lain, untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan pendapatan petani, dilakukan penguatan sistem pemasaran hasil pertanian melalui pengembangan kemitraan dengan pelaku usaha serta peningkatan akses pasar. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan harga yang lebih stabil dan menguntungkan bagi petani.

Selanjutnya, peningkatan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi fokus penting, baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, maupun stakeholder terkait lainnya, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Terakhir, penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan perbaikan perencanaan di masa yang akan datang.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jalan Kapten P Tendean Nomor 1058, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30129
Telepon (0711) 353122, 364881, Faksimile (0711) 350741
Laman dispertantph.sumseiprov.go.id, Pos-el dinpertantph@sumseiprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 73 /KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2026

tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

19. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 872 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Gubernur/Kepala Daerah.
- KETIGA : Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan wajib:
- Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : 12 Januari 2026

Kepala Dinas,



Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP 19670315 199003 1 004

Tembusan :

- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPTD Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Nama Unit Organisasi : DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN
2. Urusan Bidang :
3. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi dan Tugas Dekonsentrasi di Bidang Pertanian
4. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perbenihan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengolahan, pemasaran hasil dan penyuluhan pertanian;
- c. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. Penataan prasarana pertanian;
- e. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman serta sarana pertanian;
- f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. Pembinaan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Pembinaan, pengolahan mutu dan pemasaran hasil pertanian;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- k. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- m. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional	Rumus Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I.	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Tukar Petani					
		- Sub Sektor Tanaman Pangan	Indeks	Mengukur kemampuan tukar produk tanaman pangan maupun tanaman hortikultura petani terhadap barang dan jasa yang mereka butuhkan	$NTP \text{ Tanaman Pangan} = \frac{(\text{Indeks Harga yang diterima Petani})}{(\text{Indeks Harga yang dibayar Petani})} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Indeks		$NTP \text{ Tanaman Hortikultura} = \frac{(\text{Indeks Harga yang diterima Petani})}{(\text{Indeks Harga yang dibayar Petani})} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
II.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Peningkatan jumlah total hasil panen (tanaman pangan/hortikultura) yang diukur melalui perubahan kuantitas produksi dari waktu ke waktu atau antar wilayah yang diperoleh melalui penerapan varietas unggul dan pengelolaan lahan yang optimal	$\text{Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024})}{\text{Jumlah Produksi Tanaman Pangan Tahun 2024}} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Padi	%				
		- Jagung	%				
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura			$\text{Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura} = \frac{(\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2025} - \text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024})}{\text{Jumlah Produksi Hortikultura Tahun 2024}} \times 100\%$	BPS : Bidang Tanaman Hortikultura	Dinas Pertanian TPH Provinsi SumSel
		- Cabe Besar	%				

Palembang, 12 Januari 2026

Kepala Dinas,

Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Umum Muda (IV.c)
NIP.19670315-199003 1 004





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Kapten P Tendean Nomor 1058 Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30129
Telepon (0711) 353122, 364881 Faksimilie (0711) 350741
Laman dispertantph.sumselprov.go.id Pos-el dinpertantph@sumselprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru
Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 21 Januari 2026

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

Pihak Pertama
Kepala Dinas Pertanian TPH
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

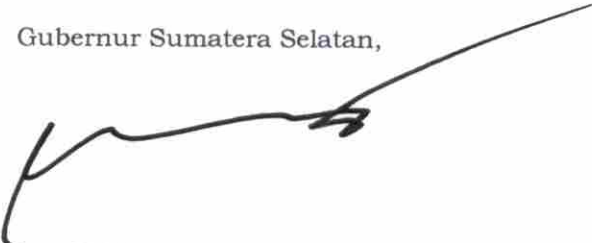
Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19670315 199003 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	Tujuan Strategis : Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai Tukar Petani :		
		- Sub Sektor Tanaman Pangan	Indeks	100,50
		- Sub Sektor Tanaman Hortikultura	Indeks	100,05
II.	Sasaran Strategis : Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Strategis	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan :		
		- Padi	%	5,00
		- Jagung	%	2,50
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura :		
		- Cabe Besar	%	10,00
III	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas	Nilai SAKIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Nilai	87,65

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 72.429.889.536	APBD
2.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 14.938.675.092	APBD
3.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 340.000.000	APBD
4.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 160.000.000	APBD
5.	Penyuluhan Pertanian	Rp 899.882.000	APBD
6.	Dukungan Manajemen	Rp 422.000.000	APBN (Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan)
7.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 183.094.771.000	APBN (Dekonsentrasi & Tugas Pembantuan)

Gubernur Sumatera Selatan,



H. Herman Deru

Palembang, 21 Januari 2026

Kepala Dinas Pertanian TPH
Provinsi Sumatera Selatan



Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP 19670315 199003 1 004

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025**

DINAS/INSTANSI : DINAS PERTANIAN TPH PROV. SUMSEL

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Target		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Tertimbang Fisik (%)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
								(Rp)	%	%	(Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					53.709.807.200	100	53.709.807.200	100,00	94,50	50.754.758.961	100,00	45,39	100,00	45,39	APBD		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja Tahunan	Dokumen	5	5 dokumen	870.864.200	1,62	870.864.200	100,00	71,91	626.204.258	100,00	0,74	100,00	1,62			
	a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2 dokumen	605.164.200	69,49	605.164.200	100,00	67,96	411.275.249	100,00	69,49	100,00	69,49		Palembang	
	- Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian	- Jumlah dokumen penyusunan programa penyuluhan pertanian	Dokumen	3	1 dokumen	39.400.000	6,51				28.046.432	100,00		100,00				
	- Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	- Jumlah dokumen penyusunan Rencana Kerja Pertanian	Dokumen	1	1 dokumen	215.764.200	35,65				211.126.603	100,00		100,00				
	- Penyusunan Dokumen Pemantapan/ Keberlanjutan KSPP/ Food Estate Berbasis Korporasi		Dokumen	1	1 dokumen	350.000.000	57,84				172.102.214	100,00		100,00				
	b. Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3 Laporan	265.700.000	30,51	265.700.000	100,00	80,89	214.929.009	100,00	30,51	100,00	30,51		17 Kab/Kota	
	- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Jumlah dokumen evaluasi	Laporan	1	1 Laporan	114.582.500	43,12			95,65	109.593.891	100,00	18,93	100,00	43,12			
	- Pengumpulan dan Validasi Data Wilayah Sentra Produksi TPH	- Jumlah dokumen justifikasi capaian angka produksi dan produktivitas TPH	Laporan	1	1 Laporan	77.517.500	29,17			92,99	72.084.392	100,00		100,00	29,17			
	- Ubinan Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah dokumen ubinan	Laporan	1	1 Laporan	73.600.000	27,70			45,18	33.250.726	100,00		100,00	27,70			
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	43.631.383.000	81,24	43.631.383.000	100,00	96,58	42.138.745.345	100,00	81,24	95,56	77,63			
2	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	290	290 orang	41.030.202.000	94,04	41.030.202.000	100,00	96,73	39.689.879.897	100,00	94,04	100,00	94,04		Palembang	
	- Gaji PNS dan PPPK					24.498.925.000	59,71	24.498.925.000		96,60	23.665.306.936	100,00	59,71	100,00	59,71		Palembang, OKUT	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS					16.531.277.000	40,29	16.531.277.000		96,93	16.024.572.961	100,00	40,29	100,00	40,29		Palembang, OKUT	
	b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	5	5 dokumen	2.601.181.000	5,96	2.601.181.000	100,00	94,14	2.448.865.448	100,00	5,96	25,59	1,53			
	- Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan					3.600.000	0,14	3.600.000		100,00	3.600.000	100,00	0,14	100,00	0,14		Palembang	
	- Belanja Honorarium Pengeluaran					9.600.000	0,37	9.600.000		100,00	9.600.000	100,00	0,37	100,00	0,37		Palembang	
	- Belanja Honorium Bendahara Pengeluaran Pembantu					14.400.000	0,55	14.400.000		100,00	14.400.000	100,00	0,55	100,00	0,55		Palembang,	
	- Belanja Honorium Pekabat Penatausahaan Keuangan					16.140.000	0,62	16.140.000		100,00	16.140.000	100,00	0,62	100,00	0,62		Palembang, OKUT	
	- Belanja Honorium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa					7.200.000	0,28	7.200.000		100,00	7.200.000	100,00	0,28	100,00	0,28		Palembang, OKUT	
	- Belanja Jasa Tenaga Kerja Operator Komputer					614.718.000	23,63	614.718.000		84,19	517.519.000	100,00	23,63	100,00	23,63		Palembang, OKUT	
	- Belanja Jasa Tenaga Kerja Perangkat Operator (TKPD)					331.338.000	12,74	331.338.000		90,48	299.782.000	100,00	12,74	100,00	12,74		Palembang, OKUT	
	- Belanja Jasa Instruktur Senam					77.000.000	2,96	77.000.000		70,00	53.900.000	100,00	2,96	100,00	2,96		Palembang, OKUT	
	- Belanja Jasa Tenaga Kerja Kebersihan					577.145.000	22,19	577.145.000		99,92	576.690.048	100,00	22,19	100,00	22,19		Palembang, OKUT	
	- Belanja Jasa Tenaga Keamanan					950.040.000	36,52	950.040.000		100,00	950.034.400	100,00	36,52	100,00	36,52		Palembang, OKUT	
	3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	127.800.000	0,24	127.800.000	100,00	98,34	126.684.202	100,00	0,24	100,00	0,24			
	a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1 dokumen	75.000.000	0,14	75.000.000	100	99,91	74.929.741	100,00	58,69	100,00	58,69		Palembang, OKUT	
	b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1 Laporan	52.800.000	0,10	52.800.000	100,00	96,13	50.754.461	100,00	41,31	100,00	41,31		Palembang, OKUT	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketaatan terhadap Aturan dan Peningkatan Kapasitas Kepegawaian	100%	100%	100%	102.340.000	0,19	102.340.000	100	83,21	85.157.200	100,00	0,19	100,00	0,19			
	a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	10	10 orang	102.340.000	0,19	102.340.000	100	83,21	85.157.200	100,00	100,00	100,00	100,00		Dalam dan Luar Provinsi	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Umum	100%	100%	100%	3.794.420.000	7,06	3.794.420.000	100,00	91,22	3.461.143.494	100,00	7,06	100,00	7,06			
	a. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	1 paket	63.200.000	1,67	63.200.000	100	99,92	63.149.866	100,00	1,67	100,00	1,67		Palembang	
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	1	1 paket	1.814.900.000	47,83	1.814.900.000	100	99,14	1.799.311.776	100,00	47,83	100,00	47,83		Palembang	
	c. Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	paket	2	2 paket	191.000.000	5,03	191.000.000	100	94,90	181.263.503	100,00	5,03	100,00	5,03		Palembang, OKUT	
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	paket	1	1 paket	55.000.000	1,45	55.000.000	100	91,07	50.089.508	100,00	1,45	100,00	1,45		Palembang, OKUT	
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	1 dokumen	55.000.000	1,45	55.000.000	100,00	86,13	47.369.500	100,00	1,45	100,00	1,45		Palembang, OKUT	
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi	laporan	2	2 laporan	865.320.000	22,81	865.320.000	100,00	65,95	570.709.341	100,00	22,81	100,00	22,81			
	- Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat					66.500.000	7,69	66.500.000	100,00	50,29	33.442.000	100,00	7,69	100,00	7,69		Palembang, OKUT	
	- Jamuan Makan (Makan dan Minum Fasilitas Kunjungan Tamu)					22.000.000	2,54	22.000.000	100,00	4,55	1.000.000	100,00	2,54	100,00	2,54		Dalam dan Luar Provinsi	
	- Fasilitas Aktivitas Lapangan					33.000.000	3,81	33.000.000	100,00	28,21	9.310.000	100,00	3,81	100,00	3,81		Dalam dan Luar Provinsi	
	- Kunjungan Kerja, Koordinasi, Sosialisasi dan Sinkronisasi					743.820.000	85,96	743.820.000	100,00	70,84	526.957.341	100,00	85,96	100,00	85,96		Dalam dan Luar Provinsi	
	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SIPD	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	1	1 dokumen	750.000.000	19,77	750.000.000	100,00	99,90	749.250.000	100,00	19,77	100,00	19,77		Palembang	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Target		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Tertimbang Fisik (%)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
								(Rp)	%	%	(Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12	13	14	15	16
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Administrasi Perkantoran	laporan	2	2 laporan	1.615.000.000	3,01	1.615.000.000	100,00	62,93	1.016.327.030	100,00	3,01	100,00	3,01			
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1 laporan	5.000.000	0,31	5.000.000	100,00	34,00	1.700.000	100,00	0,31	100,00	0,31	Palembang		
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	1	1 laporan	1.610.000.000	99,69	1.610.000.000	100,00	63,02	1.014.627.030	100,00	99,69	100,00	99,69	Palembang, OKUT		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	253	253 unit	3.568.000.000	6,64	3.568.000.000	100,00	92,53	3.301.497.432	100,00	6,64	100,00	6,64			
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	253	253 unit	900.000.000	25,22	900.000.000	100,00	85,99	773.874.926	100,00	25,22	100,00	25,22	Palembang, OKUT		
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	135	135 unit	152.000.000	4,26	152.000.000	100	99,06	150.571.500	100,00	4,26	100,00	4,26	Palembang, OKUT		
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1unit	1	1 unit	2.516.000.000	70,52	2.516.000.000	100,00	94,48	2.377.051.006	100,00	70,52	100,00	70,52	Palembang, OKUT		
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					34.658.160.830		34.658.160.830	100,00	97,54	33.806.112.771	100,00	29,29	100,00	29,29	APBD		Inflasi
1	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian					29.481.811.595	85,06	29.481.811.595	100,00	98,12	28.928.128.018	100,00	85,06	99,35	84,51			
	a. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	laporan	8	8 laporan	28.880.786.595	97,96	28.880.786.595	100,00	98,11	28.335.152.312	100,00	97,96	99,35	97,32			
	- Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Sayuran	- Luas Pengembangan Tanaman Sayuran	laporan	1	1 laporan	622.772.000	2,16	622.772.000	100,00	98,90	615.945.350	100,00	2,16	100,00	2,16	17 Kab/Kota		
	- Pengembangan UPJA	- Jumlah UPJA yang dibina	laporan	1	1 laporan	199.400.000	0,69	199.400.000	100,00	80,26	160.039.000	100,00	0,69	100,00	0,69	17 Kab/Kota		
	- Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Padi dan Jagung	- Luas Pengembangan Tanaman Pangan	laporan	1	1 laporan	24.499.186.080	84,83	24.499.186.080	100,00	98,54	24.140.420.412	100,00	84,83	100,00	84,83	17 Kab/Kota		
	- Promosi Produk Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah sarana produksi benih padi	laporan	1	1 laporan	385.290.000	1,33	385.290.000	100,00	83,14	320.330.200	100,00	1,33	100,00	1,33	17 Kab/Kota		
	- Pembinaan, Pengawasan, Pemanfaatan Pupuk dan Pestisida	- Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida	laporan	1	1 laporan	97.125.000	0,34	97.125.000	100,00	91,91	89.264.328	100,00	0,34	100,00	0,34	17 Kab/Kota		
	- Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Buah Jeruk	- Jumlah sarana produksi tanaman hortikultura	laporan	1	1 laporan	308.437.000	1,07	308.437.000	100,00	98,21	302.906.881	100,00	1,07	100,00	1,07	17 Kab/Kota		
	- Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Tanaman Nanas	- Jumlah sarana produksi tanaman hortikultura	laporan	1	1 laporan	159.618.000	0,55	159.618.000	100,00	99,04	158.092.996	100,00	0,55	100,00	0,55	17 Kab/Kota		
	- Penyediaan Alat Pra Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	- Jumlah Alat Pra Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura	laporan	1	1 laporan	2.420.000.000	8,38	2.420.000.000	100,00	99,14	2.399.234.995	100,00	8,38	100,00	8,38	17 Kab/Kota		
	- Pengukuran Susut Hasil Manual dan Mekanis Tanaman Pangan	- Jumlah Susut Hasil Manual dan Mekanis TP	laporan	1	1 Laporan	188.958.515	0,65	188.958.515	100,00	78,81	148.918.150	100,00	0,65	100,00	0,65	17 Kab/Kota		
	b. Pengawasan Sebaran Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan	- Jumlah Pengawasan sarana Pasca Panen Tanaman Pangan				425.000.000	1,44	425.000.000	100,00	98,23	417.489.380	90,00	1,30	100,00	1,44	17 Kab/Kota		
	b. Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	- Jumlah Pengawasan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	1	1 laporan	176.025.000	0,60	176.025.000	100,00	99,69	175.486.326	100,00	0,60	18,00	0,11	17 Kab/Kota		
2	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih TPH yang difasilitasi	dokumen	1	1 dokumen	5.176.349.235	14,94	5.176.349.235	100,00	94,24	4.877.984.753	100,00	14,94	103,95	15,53			
	a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura	Sertifikat	16	16 Sertifikat	3.435.445.000	17,56	3.435.445.000	100,00	93,30	3.205.322.965	100,00	66,37	100,00	66,37	Palembang		
	- Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura	Sertifikat	16	16 Sertifikat	270.975.000		270.975.000	100,00	89,96	243.767.563	100,00	7,89	100,00	7,89	Palembang		
	- Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan X Sumatera Selatan					3.164.470.000		3.164.470.000	100,00	93,59	2.961.555.402	100,00	92,11	100,00	92,11	Palembang		
	b. Pengawasan Mutu, Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit hortikultura	laporan	5	5 laporan	1.740.904.235	33,63	1.740.904.235	100,00	96,08	1.672.661.788	100,00	33,63	111,76	37,59			
	- Kebun Percontohan Tanaman Sayuran dan Tanaman Buah-buahan	- Jumlah kebun percontohan tanaman sayuran dan buah				574.422.125	33,00	574.422.125		94,78	544.445.438	100,00	33,00	100,00	33,00	Palembang		
	- Perbanyakan Benih Unggul dan Pemeliharaan Koleksi Plasma Nutfah Tanaman Florikultura	- Jumlah Benih Padi				350.800.610	20,15	350.800.610		97,58	342.315.150	100,00	20,15	100,00	20,15	Palembang		
	- Perbanyakan Benih Unggul Padi di Balai Benih Induk	- Jumlah Benih Padi				372.693.500	21,41	372.693.500		98,75	368.037.250	100,00	21,41	100,00	21,41	Palembang		
	- Perbanyakan Benih Tanaman Hortikultura di BBIH	- Jumlah Benih Tanaman Hortikultura				342.188.000	19,66	342.188.000		93,70	320.642.300	100,00	19,66	100,00	19,66	Palembang		
	- Perbanyakan Benih Tanaman Hortikultura (GSMP)	- Jumlah Benih Tanaman Hortikultura				100.800.000	5,79	100.800.000		96,45	97.221.650	100,00	5,79	100,00	17,55	OKUT		
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					1.339.804.300		1.339.804.300	100,00	94,72	1.268.998.132	100,00	1,13	100,00	1,13	APBD		
1	Penataan Prasarana Pertanian					1.339.804.300	100,00	1.339.804.300	100,00	94,72	1.268.998.132	100,00	100,00	100,00	100,00			
	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani	Dokumen	1	1 dokumen	944.804.300	70,52	944.804.300	100,00	94,48	892.625.803	100,00	70,52	100,00	70,52	Palembang		
	- Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan X Sumatera Selatan					933.150.000		933.150.000			886.016.503	100,00	98,77	100,00	98,77	Palembang		
	- Pendampingan Cetak Sawah Rakyat /Optimasi Lahan					7.000.000		7.000.000			4.654.300	100,00	0,74	100,00	0,74	Palembang		
	- Belanja Kurang Bayar TA 2024					4.654.300		4.654.300			1.955.000	100,00	0,49	100,00	0,49			
b.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi (unit)	Unit	3	3 Unit	395.000.000	29,48	395.000.000		95,28	376.372.329	100,00	29,48	100,00	29,48			
	- Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya					395.000.000	-	395.000.000			376.372.329					Palembang		
	- ATK					21.000.000	-	21.000.000		94,77	19.901.309	100,00	5,32	100,00	5,32	Palembang		
	- UPTD BPBTPH					309.000.000	-	309.000.000		96,63	298.599.815	100,00	78,23	100,00	78,23	Palembang		
	- UPTD BPTPH					65.000.000		65.000.000		89,03	57.871.205	100,00	16,46	100,00	16,46			
IV	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					643.720.000		643.720.000	100,00	98,85	636.318.105	100,00	0,54	100,00	0,54	APBD		
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi :	Kali	220	220 Kali	643.720.000	100,00	643.720.000	100,00	98,85	636.318.105	100,00	100,00	100,00	100,00			

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Target		Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik		Tertimbang Fisik (%)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Tematik	Faktor Penghambat/Pendorong
								(Rp)	%	%	(Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12	13	14	15	16
	a.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luas serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	Ha	2.500	2500 Ha	508.800.000	79,04	508.800.000	100,00	99,33	505.380.210	100,00	79,04		17 Kab/Kota		
	b.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian TPH yang difasilitasi	ha	500	500 ha	134.920.000	26,52	134.920.000	100,00	97,05	130.937.895	100,00	20,96		17 Kab/Kota		
V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					27.977.858.400		27.977.858.400	100,00	95,27	26.654.938.071	100,00	23,64	23,64	APBD		Kemiskinan	
1	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian yang meningkat kapasitasnya	Dokumen	1	1 Dokumen	737.845.000	2,64	737.845.000	100,00	89,00	656.696.662	100,00	2,64	200,00	5,27		
	a.	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah ketenagaan penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	45	45 Orang	737.845.000	100,00	737.845.000	100,00	89,00	656.696.662	100,00	2,64	100,00	100,00		
	-	Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian					498.245.000	67,53	498.245.000	100,00	85,23	424.632.000	100,00	67,53	100,00	67,53	17 Kab/Kota	
	-	Fasilitasi Rekapitulasi Database Petani dan VERVAL Simluhan					239.600.000	32,47	239.600.000	100,00	96,86	232.064.662	100,00	32,47	100,00	32,47	17 Kab/Kota	
2	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian					26.486.317.000	94,67	26.486.317.000	100,00	95,74	25.357.463.514	100,00	94,67	100,00	94,67			
	a.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi pertanian	Dokumen	1	1 Dokumen	248.920.000	0,94	248.920.000	100,00	97,17	241.880.004	100,00	0,94	100,00	0,94	OKUT	
	b.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	1.400	1400 Kelompok	26.237.397.000	99,06	26.237.397.000	100,00	95,72	25.115.583.510	100,00	99,06	100,00	99,06	17 Kab/Kota	
3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani	Unit	1	1 Unit	753.696.400	2,69	753.696.400	100,00		640.777.895	100,00	2,69	100,00	2,69		
	a.	Pendampingan dan Pengawasan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	7	7 Unit	578.902.000	76,81	578.902.000	100,00	83,75	484.849.941	100,00	76,81	100,00	76,81	Palembang	
	b.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang di bentuk dan beroperasi	Unit	1	1 Unit	174.794.400	23,19	174.794.400	100,00	89,21	155.927.954	100,00	23,19	100,00	23,19	Palembang	
TOTAL APBD						118.329.350.730		118.329.350.730	100,00	95,60	113.121.126.040	100,00		100,00				
Jumlah : 12 Kegiatan																		

Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan

Dr. Ir. H.R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 198703151990031004

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN APBN
DANA DEKONSENTRASI SATKER DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROPINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
PER 31 DESEMBER 2025

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEKONSENTRASI

Kode	Program / Aktivitas / KRO / RO / Komponen / SubKompok / Detil	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Target		Realisasi Sampel Dengan Bulan Ini		Penyerapan Fisik sampai bulan ini				Target Output	Realisasi Output		Lokasi	Keterangan
								Target		Realisasi						
				(Rp)	%	(Rp)	(%)	Fisik (%)	TTb (%)	Fisik (%)	TTb (%)			(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	DIPA TANAMAN PANGAN (119072)	374.435.000	100.00	374.435.000	100.00	374.124.900	99.92	100.00	54.50	99.92	54.45					
03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan dan Berkualitas	322.995.000	100.00	322.995.000	100.00	322.764.900	99.93	100.00	88.28	99.93	88.20					
4579	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	322.995.000	100.00	322.995.000	100.00	322.764.900	99.93	100.00	100.00	99.93	99.93					
4579.PDC	Sertifikasi Produk	322.995.000	100.00	322.995.000	100.00	322.764.900	99.93	100.00	100.00	99.93	99.93	1.400 Produk	1400 Produk	100.00		
4579.PDC.001	Sertifikasi Benih Padi	322.995.000	100.00	322.995.000	100.00	322.764.900	99.93	100.00	100.00	99.93	99.93					
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	51.440.000	100.00	51.440.000	100.00	51.360.000	99.84	100.00	13.74	99.84	13.72					
1776	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	51.440.000	100.00	51.440.000	100.00	51.360.000	99.84	100.00	100.00	99.84	99.84					
1776.EBD	Perencanaan dan Penganggaran Internal	51.440.000	100.00	51.440.000	100.00	51.360.000	99.84	100.00	100.00	99.84	99.84	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00		
1766.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	51.440.000	100.00	51.440.000	100.00	51.360.000	99.84	100.00	100.00	99.84	99.84					
II	DIPA PRASARANA DAN SARANA (119004)	150.000.000	100.00	150.000.000	100.00	38.174.100	25.45	100.00	21.83	100.00	21.83					
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	150.000.000	600.00	150.000.000	100.00	38.174.100	25.45	100.00	100.00	100.00	100.00					
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	150.000.000	600.00	150.000.000	100.00	38.174.100	25.45	100.00	100.00	100.00	100.00					
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	150.000.000	100.00	150.000.000	100.00	38.174.100	25.45	100.00	100.00	100.00	100.00	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	Provinsi	Capaian Realisasi mencapai 92,21%. Hal ini dikarenakan perhitungan membandingkan angka pagu yang bukan blokir dengan yang sudah blokir senilai Rp.108.600.000,- dari total Pagu senilai Rp. 150.000.000,- sehingga Dana yang tersedia sampai dengan saat ini senilai Rp. 41.500.000,-
III	DIPA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN (418009)	162.630.000	100.00	162.630.000	100.00	162.260.000	99.77	100.00	23.67	100.00	23.67					
018.10.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	162.630.000	100.00	162.630.000	100.00	162.260.000	99.77	100.00	100.00	100.00	100.00					
1812	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	162.630.000	100.00	162.630.000	100.00	162.260.000	99.77	100.00	100.00	100.00	100.00					
1812.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	162.630.000	100.00	162.630.000	100.00	162.260.000	99.77	100.00	100.00	100.00	100.00					
1812.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Provinsi	162.630.000	100.00	162.630.000	100.00	162.260.000	99.77	100.00	100.00	100.00	100.00	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1 Daerah (Prov/Kab/Kota)	100.00		
TOTAL		687.065.000	100.00	687.065.000	100.00	574.559.000	83.63	100.00		99.95						

LAPORAN KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
APBN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
PER 31 DESEMBER 2025

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN

TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI

Kode	Program / Aktivitas / KRO / RO / Komponen / SubKomp / Detil	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Target		Realisasi Sampai Dengan Bulan Ini		Penyerapan Fisik sampai bulan ini				Target Output	Realisasi Output		Lokasi	Keterangan
				(Rp)	%	(Rp)	(%)	Target		Realisasi			Volume	(%)		
								Fisik (%)	TTb (%)	Fisik (%)	TTb (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	DIPA TANAMAN PANGAN (119129)	637.995.000	100.00	637.995.000	100.00	444.964.043	69.74	100.00	100.00	87.50	95.00					
018.03.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	178.000.000	100.00	178.000.000	100.00	172.265.000	96.78	100.00	100.00	95.00	95.00					
1782	Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia Tanaman Pangan	178.000.000	100.00	178.000.000	100.00	172.265.000	96.78	100.00	100.00	95.00	95.00					
1782.AEA	Koordinasi	178.000.000	100.00	178.000.000	100.00	172.265.000	96.78	100.00	100.00	95.00	95.00					
1782.AEA.624	Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produkta Tanaman Pangan Pelaksanaan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Produkta Tanaman Serelia Tanaman Pangan	178.000.000	100.00	178.000.000	100.00	172.265.000	96.78	100.00	100.00	95.00	95.00	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00	Provinsi	
018.03.WA	Program Dukungan Manajemen	459.995.000	100.00	459.995.000	100.00	272.899.043	59.28	100.00	72.10	80.00	87.68					
1786	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan	459.995.000	100.00	459.995.000	100.00	272.899.043	59.28	100.00	100.00	80.00	80.00					
1786.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	403.605.000	87.74	403.605.000	100.00	217.850.000	53.98	100.00	87.74	80.00	70.19	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	Provinsi	
1786.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	56.390.000	12.26	56.390.000	100.00	54.849.043	97.27	100.00	12.26	80.00	9.81	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	Provinsi	
1786.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.950.000	1.00	4.950.000	100.00	3.849.043	77.78	100.00	8.78	80.00	7.02					
1786.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	51.440.000	11.18	51.440.000	100.00	51.000.000	99.14	100.00	91.22	80.00	72.98					
II	DIPA Lahan dan Irigasi Pertanian (091335)	1.706.482.210.000	100.00	1.706.482.210.000	100.00	1.345.156.088.030	78.83	100.00	97.83	95.20	93.14					
018.13.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1.706.385.830.000	100.00	1.706.385.830.000	100.00	1.345.100.608.030	84.62	99.99	99.99	90.39	90.39					
7823	Perlindungan dan Penyedia Lahan	1.706.385.830.000	100.00	1.706.385.830.000	100.00	1.345.100.608.030	78.83	99.99	99.99	90.39	90.39					
QEH.001	Bantuan Olah Lahan Pasca Optimalisasi Lahan	61.652.936.000	3.61	61.652.936.000	100.00	39.749.935.000	64.47	100.00	3.61	75.00	2.71	57.678 Kelompok Masyarakat	47.583 Kelompok Masyarakat	70.31	1) Provinsi, 2) ME, 3) OKI, 40 BA, 50 OKUT, 6) Ogan Ilir	Masih Pelaksanaan Bantuan Olah Lahan Pasca OPLA dan sudah terlaksana 75%
QMA.001	Data dan Informasi Publik	200.000.000	0.01	200.000.000	100.00	-	-	15.00	0.00	15.00	0.00	1 Dokumen	0 Dokumen		Provinsi	KRO Baru Revisi POK Ke-5 Tgl. 07-11 2025 dan merupakan pagu blokir
RBO.002	Optimasi Lahan	259.531.228.000	15.21	259.531.228.000	100.00	215.915.259.775	83.19	100.00	15.21	95.00	14.45	503.56 km ²	481.11 km ²	95.54	1) Provinsi, 2) MUBA, 3) ME, 4) OKI, 5) OKU, 6) PA, 7) BA, 8) OKUT, 9) PALI	Masih terdapat Pagu Blokir Sebesar Rp. 1.471.624.000,-
RBO.005	Cetak Sawah (QW)	1.353.897.239.000	79.34	1.353.897.239.000	100.00	1.060.942.782.869	78.36	100.00	79.34	90.00	71.41	37.890 Hektar	33.250 Hektar	87.75	1) Provinsi, 2) MUBA, 3) ME, 4) OKI, 5) OKUT, 6) Ogan Ilir, 7) MURA, 8) PALI, 9) 4 Lawang, 10) MURATARA	Sisa Kontrak Cetak Sawah sisa dilakukan RPATA di T.A. 2026
RBR.001	SID Cetak Sawah (QW)	26.013.303.000	1.52	26.013.303.000	100.00	23.519.164.666	90.41	100.00	1.52	100.00	1.52	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1) Provinsi, 2) MUBA, 3) ME, 4) OKU, 5) OKUT, 6) Ogan Ilir, 7) MURA, 8) PALI, 9) 4 Lawang, 10) MURATARA	Progres Kontrak SID Cetak Sawah 100%
RBR.002	SID Optimalisasi Lahan	5.091.224.000	0.30	5.091.224.000	100.00	4.973.466.000	97.69	100.00	0.30	100.00	0.30	2 Dokumen	2 Dokumen	100.00	1) Provinsi	Progres Kontrak SID Oplah sudah tercapai 100% dan Realisasi Pekerjaan sudah tercapai 100%
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	76.380.000	100.00	76.380.000	100.00	55.480.000	72.64	100.00	100.00	100.00	100.00					
1787	Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	76.380.000	100.00	76.380.000	100.00	55.480.000	72.64	100.00	100.00	100.00	100.00					
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	76.380.000	100.00	76.380.000	100.00	55.480.000	72.64	100.00	100.00	100.00	100.00	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1) Provinsi, 2) Lahat, 3) MUBA, 4) MURA, 5) MURATARA, 6) ME, 7) OKI, 8) OKU, 9) Palembang, 10) Prabumulih, 11) Pagar Alam, 2) LL, 13)BA, 14) OKUT, 15) OKUS, 16) Ogan Ilir, 17) 4 Lawang, 18) PALI	Persiapan pelaksanaan Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan
III	DIPA PRASARANA DAN SARANA (119137)	37.096.068.000	100.00	37.096.068.000	100.00	36.032.110.894	97.13	97.13	98.52	87.50	86.02					
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumal Pangan Berkualitas	35.996.068.000	100.00	35.996.068.000	100.00	35.390.526.882	98.32	100.00	97.03	100.00	97.03					
1785	Perlindungan dan Penyediaan Lahan	32.572.408.000	100.00	32.572.408.000	100.00	32.572.406.410	100.00	100.00	90.49	100.00	90.49					
RBO.002	Optimasi Lahan	24.894.071.000	76.43	24.894.071.000	100.00	24.894.070.040	100.00	100.00	76.43	100.00	76.43	45.26 km ²	45.26 km ²	100.00	1) Provinsi, 2) MUBA, 3) OKI, 4) Banyuwangi	Progres kontrak Konstruksi OPLA sudah 100%
RBO.005	Cetak Sawah (QW)	89.582.000	0.28	89.582.000	100.00	89.581.370	100.00	100.00	0.28	100.00	0.28	1 Ha	1 Ha	100.00	1) Provinsi	Progres Kontrak Konstruksi Cetak Sawah sudah 100%
RBR.001	SID Cetak Sawah (QW)	4.264.000.000	13.09	4.264.000.000	100.00	4.264.000.000	100.00	100.00	13.09	100.00	13.09	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1) Provinsi	Progres kontrak SID Cetak Sawah sudah 100%

Kode	Program / Aktivitas / KRO / RO / Komponen / SubKomp / Detil	Pagu (Rp)	Bobot (%)	Target		Realisasi Sampai Dengan Bulan Ini		Penyerapan Fisik sampai bulan ini				Target Output	Realisasi Output		Lokasi	Keterangan
						(Rp)	(%)	Target		Realisasi						
								Fisik (%)	TTb (%)	Fisik (%)	TTb (%)		Volume	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
RBR.002	SID Optimasi Lahan	3.324.755.000	10.21	3.324.755.000	100.00	3.324.755.000	100.00	100.00	10.21	100.00	10.21	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1) Provinsi	Progres kontrak SID Opla sudah 20% (Kelanjutan 80% pada Ditjen LP Satker 691335
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	340.000.000	100.00	340.000.000	100.00	214.689.974	63.14	100.00	94.45	100.00	94.45					
RAG.006	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan (QW)	340.000.000	100.00	340.000.000	100.00	214.689.974	63.14	100.00	100.00	100.00	100.00	1 Unit	1 Unit	100.00	1) Provinsi, 2) Lahat, 3) MUBA, 4) MURA, 5) muratara, 6) ME, 7) OKI, 8) OKU, 9) Palembang, 10) Prabumulih, 11) Pagar Alam, 12) LL, 13) BA, 14) OKUT, 15) OKUS, 16) Ogan Ilir, 17) 4 Lawang, 18) PALI	Pelaksanaan Monitoring Pemanfaatan Alsintan dan Pengumpulan Data Alsintan dan UPJA untuk Pra Panen Tanaman Pangan
3993	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	3.083.660.000	100.00	3.083.660.000	100.00	2.603.430.198	84.43	100.00	50.00	100.00	50.00	271.429	271.429	100.00		
QAA.001	Penerima Pupuk Bersubsidi yang Divalidasi dan Diverifikasi	2.449.160.000	79.42	2.449.160.000	100.00	2.190.084.154	89.42	100.00	79.42	100.00	79.42	271.429 Orang	271.429 Orang		1) Provinsi, 2) Lahat, 3) MUBA, 4) MURA, 5) muratara, 6) ME, 7) OKI, 8) OKU, 9) Palembang, 10) Prabumulih, 11) Pagar Alam, 12) LL, 13) BA, 14) OKUT, 15) OKUS, 16) Ogan Ilir, 17) 4 Lawang, 18) PALI	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi
QAA.002	Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida	634.500.000	20.58	634.500.000	100.00	413.346.044	65.15	100.00	20.58	100.00	20.58	1 Laporan	1 Laporan		1) Provinsi, 2) Lahat, 3) MUBA, 4) MURA, 5) muratara, 6) ME, 7) OKI, 8) OKU, 9) Palembang, 10) Prabumulih, 11) Pagar Alea, 12) LL, 13) BA, 14) OKUT, 15) OKUS, 16) Ogan Ilir, 17) 4 Lawang, 18) PALI	Pelaksanaan Pengawasan Penerima Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen	1.100.000.000	100.00	1.100.000.000	100.00	641.584.312	58.33	100.00	100.00	75.00	75.00					
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1.100.000.000	100.00	1.100.000.000	100.00	641.584.312	58.33	100.00	100.00	75.00	75.00					
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.100.000.000	100.00	1.100.000.000	100.00	641.584.312	58.33	100.00	100.00	75.00	75.00	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00	1) Provinsi, 2) Lahat, 3) MUBA, 4) MURA, 5) muratara, 6) ME, 7) OKI, 8) OKU, 9) Palembang, 10) Prabumulih, 11) Pagar Alam, 12) LL, 13) BA, 14) OKUT, 15) OKUS, 16) Ogan Ilir, 17) 4 Lawang, 18) PALI	Pelaksanaan Layanan Manajemen Keuangan. Terdapat Pagu Blokir sebesar Rp. 150.000.000,- (Dana yang tersedia sebesar Rp. 950.000.000,- dengan capaian saat ini sebesar 67,54%)
Jumlah Tugas Pembantuan Provinsi		1.744.196.273.000	100.00	1.744.196.273.000		1.381.633.162.967	79.21	99.04		90.07						

Kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan

Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si
Pembina Utama Muda/ (IV c)
NIP 196703151990031004

Hasil Review Internal LKJIP Dinas Pertanian TPH Tahun 2025

Sistematika Penulisan LKJIP Tahun 2025	Review		Ket
	Kasubbag PEP	Sekretaris Dinas	
Bab I Pendahuluan A. Aspek Strategis Organisasi B. Tugas Pokok dan Fungsi C. Struktur Organisasi D. Sumber Daya Manusia E. Dukungan Anggaran F. Permasalahan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan	→ Tinjau kembali dokumen perencanaan tahun 2025 untuk point Aspek Strategis Organisasi → Untuk point Permasalahan dilihat kembali hasil rapat evaluasi triwulan tahun 2025	Kesesuaian pengantar/ penanda isu strategis dan Arah Kerja berdasarkan permasalahan.	
Bab II Perencanaan Kinerja A. Rencana Strategis B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	OK	OK	
Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran	→ Untuk dirapikan kembali pembuatan tabel dan gambar → pastikan kembali capaian yang disampaikan update saat laporan disusun.	Tambahkan Capaian Kinerja organisasi ts tidak hanya menjadi IPU	
Bab IV Penutup	OK	OK	

KOREKSI LAPORAN KINERJA

Nama PD : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
 Tahun Anggaran : 2025
 Tujuan : Untuk meyakinkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai format Dan sistematika laporan kinerja.

NO	FORMAT LAPORAN	LAMPIRAN II PERATURAN MENPAN & RB NOMOR 53 TAHUN 2014	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Format Laporan Kinerja	Sistematika Laporan Kinerja yang dianjurkan :			
		BAB I Pendahuluan	√		Sudah Menjabarkan penjelasan dengan terperinci dan sesuai dengan PERMENPAN 53 Tahun 2014.
		BAB II Perencanaan Kinerja	√		Sudah Menyajikan Penjelasan
		BAB III Akuntabilitas	√		
		A. Capaian Kinerja Organisasi			
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	√		Untuk Bab III penjelasan sudah dijabarkan dengan terperinci melalui tabel pencapaian dan analisis sesuai PERMENPAN 53 Tahun 2014
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	√		
		3. Membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	√		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	√		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;	√		
		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	√		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;	√		
		B. Realisasi Anggaran	√		
		BAB IV Penutup	√		
		LAMPIRAN :	√		


 Ron Sarimalita



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/017/ KPTS/ ITDAPROV.IV/ 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/002/ KPTS/ITDAPROV/ 2026 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00189/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 10 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret sd 17 Maret 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- a. Kesesuaian sasaran dan indikator antara LKjIP dan Perjanjian Kinerja
 - Terdapat sasaran dan indikator yang ada di Perjanjian Kinerja namun tidak ada di LKjIP yaitu Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas" Indikator "Nilai Sakip Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura".

- b. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika dan Substansi Penyajian LKjIP tahun 2025 pada lembar cover LKjIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan sudah ditandatangani Kepala OPD, namun belum diberi tanggal.

1) Bab I Pendahuluan

- Sub Latar belakang belum ada, dan belum menyajikan Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

LKjIP Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Perjanjian Kinerja.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reviu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025,

diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Definisi operasional belum dijelaskan di BAB III Akuntabilitas Kinerja hanya tertera pada Lampiran IKU;
- Telah membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Target akhir tahun Renstra Perangkat Daerah;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
- Telah menjelaskan penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya yang telah dilakukan
- Telah menjelaskan Solusi yang telah dilakukan
- Belum terdapat tabel program/kegiatan namun tidak ada penjelasan bahwa program/kegiatan tersebut telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran / kinerja pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan

4) Bab IV

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan telah menguraikan kesimpulan umum namun belum menggambarkan secara umum mengenai capaian kinerja organisasi dan langkah strategis belum dijelaskan secara rinci di sub tersendiri.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan agar :

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

a. BAB I

- Agar sub latar belakang dibuat tersendiri dan menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

b. BAB III

1) Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- Agar dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator perangkat daerah;
- Agar penyebab keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dijelaskan per indikator;
- Agar solusi yang telah dilakukan dijelaskan per indikator dan dibuatkan sub tersendiri;
- Agar membuat tabel program/kegiatan dan dijelaskan dalam bentuk narasi bahwa program/kegiatan tersebut telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

c. BAB IV

Agar sub kesimpulan menggambarkan secara umum mengenai capaian kinerja organisasi dan agar sub langkah strategis dijelaskan lebih rinci di sub tersendiri.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Palembang, Maret 2026

Menyetujui :
**KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN
PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



Dr. Ir. H. R. BAMBANG PRAMONO, M.Si
NIP. 196703151990031004

WAKIL PENANGGUNG JAWAB

ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.Si., CGCAE
NIP. 197103112000032008